

**PENYELENGGARAAN MANAJEMEN BENCANA DALAM MEMBANGUN
MASYARAKAT TANGGUH BENCANA DI KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Disusun Oleh:

MOCHAMAD FARIS HARDIAN

NIM 135030100111036



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2017

LEMBAR PENGESAHAN

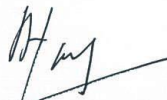
Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 9 Januari 2018
Jam : 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Mochamad Faris Hardian
Judul : Penyelenggaraan Manajemen Bencana dalam Membangun
Masyarakat Tangguh Bencana di Kabupaten Malang

Malang, 9 Januari 2018

**DINYATAKAN LULUS
MAJELIS PENGUJI**

Ketua



Dr. Bambang Santoso H, MS
NIP. 19610204 198601 1 001

Penguji I



Dr. Siswidiyanto, MS
NIP. 19600717 198601 1 002

Penguji II



Dr. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dinyatakan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 22 Desember 2017



Materai 6000

Mochamad Faris Hardian

NIM 135030100111036

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebuah karya kecil ini saya persembahkan untuk keluarga kecil saya. Bapak Suhadi, Ibu Dzahra serta Kakak saya Dodi Sutanto, Andy Novianto, dan Rachma Yunita yang senantiasa memperjuangkan dan memberikan dorongan kepada saya demi kelancaran dalam perkuliahan hingga meraih gelar Sarjana. Ini perjuangan kalian, terima kasih..





RINGKASAN

Mochamad Faris Hardian, 2017, **Penyelenggaraan Manajemen Bencana dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana di Kabupaten Malang**, Pembimbing: Dr. Bambang Santoso H, MS.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan salah satu pencapaian pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Desa Ngadas merupakan salah satu desa di Kabupaten Malang yang mempunyai tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang sebagai penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana segera merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di Desa Ngadas. BPBD Kabupaten Malang dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berpedoman pada Peraturan Kepala (PERKA) Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) No 1 tahun 2012 terkait dengan desa tangguh bencana (DESTANA). Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait penyelenggaraan manajemen bencana di Desa Ngadas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yang pertama adalah penyelenggaraan manajemen bencana dalam membangun masyarakat tangguh bencana. Aspek yang akan diteliti mencakup regulasi, tahapan, pembangunan kapasitas, sosialisasi, pelebagaan, pelibatan aktor, serta manfaat langsung bagi masyarakat. Fokus yang kedua adalah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penyelenggaraan manajemen bencana dalam membangun masyarakat tangguh bencana di Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisa Miles, Huberman dan Saldana.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penyelenggaraan manajemen bencana di daerah tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat Desa Ngadas. Dampak tersebut dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk pulih kembali setelah ditimpa bencana. Masyarakat di Kabupaten Malang khususnya masyarakat Desa Ngadas telah membuktikan ketangguhan terhadap bencana, menurut data kejadian bencana yang dihimpun oleh BPBD Kabupaten Malang sejak manajemen bencana berbasis masyarakat mulai diterapkan di Desa Ngadas menunjukkan penurunan jumlah korban jiwa setiap tahunnya. Namun dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat, sehingga sedikit menghambat proses penyelenggaraan manajemen bencana di daerah tersebut.

Kata Kunci : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manajemen Bencana, Masyarakat Tangguh Bencana, Desa Ngadas

SUMMARY

Mochamad Faris Hardian, 2017, **Implementation of Disaster Management in Building Community Resilience Disaster in Malang Regency**, Advisor: Dr. Bambang Santoso H, MS, 152.

The implementation of disaster management is one of the achievements of national development implemented by the government and local government. Ngadas Village is one of the villages in Malang Regency which has high disaster level. Regional Disaster Management Agency (BPBD) Malang Regency as the responsible for the implementation of disaster management immediately formulate and set disaster management policy in the Village Ngadas. BPBD Malang Regency in carrying out its functions and duties based on Head of Regulation (PERKA) National Disaster Management Agency (BNPB) No 1 of 2012 associated with the village resilient disaster (DESTANA). Therefore, the authors are interested to conduct research related to the implementation of disaster management in Ngadas Village

This research uses descriptive research method with qualitative approach. The first focus of research is the implementation of disaster management in building a resilient community. Aspects to be studied include regulation, stages, capacity building, socialization, institutionalization, involvement of actors, as well as direct benefits to society. The second focus is the factors that support and hinder the implementation of disaster management in building a resilient community in Malang Regency. Technique of collecting data is done by interview, observation, documentation. Data analysis using analysis model Miles, Huberman and Saldana.

Based on the results of research that has been done, the implementation of disaster management in the area is able to give a positive impact on the community Ngadas Village. The impact can be seen from the people's ability to recover after the disaster struck. The community in Malang Regency especially Ngadas Village community has proved the resilience to the disaster, according to disaster incidence data collected by BPBD Malang Regency since community based disaster management started to be applied in Ngadas Village shows decrease of number of casualties every year, but in the implementation there are inhibiting factors, thus slightly hindering the process of organizing disaster management in the area.

Keywords: Regional Disaster Management Agency, Disaster Management, Community Resilient Disaster, Ngadas Village

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penyelenggaraan Manajemen Bencana dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan mencapai hasil yang baik tanpa adanya bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Bambang Santoso H, MS selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan semangat serta dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.

5. Seluruh Dosen jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis selama kegiatan perkuliahan.
6. Keluarga kecil saya. Bapak Suhadi, Ibu Dzahra serta Kakak saya Dodi Sutanto, Andy Novianto, dan Rachma Yunita yang senantiasa memberikan bantuan, dorongan, serta do'a yang tak henti dipanjatkan demi kelancaran penulis dalam meraih gelar sarjana.
7. Teman-teman seperjuangan semasa kuliah yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta meluangkan waktu untuk berdiskusi.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam proses pengerjaan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dalam hal teknis maupun substansi materinya. Untuk itu diharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Kiranya karya tulis ini dapat memberikan manfaat keilmuan bagi rekan-rekan yang sedang berjuang dalam menyelesaikan skripsinya.

Malang, 27 Desember 2017

Penulis

Mochamad Faris Hardian
NIM 135030100111036



DAFTAR ISI

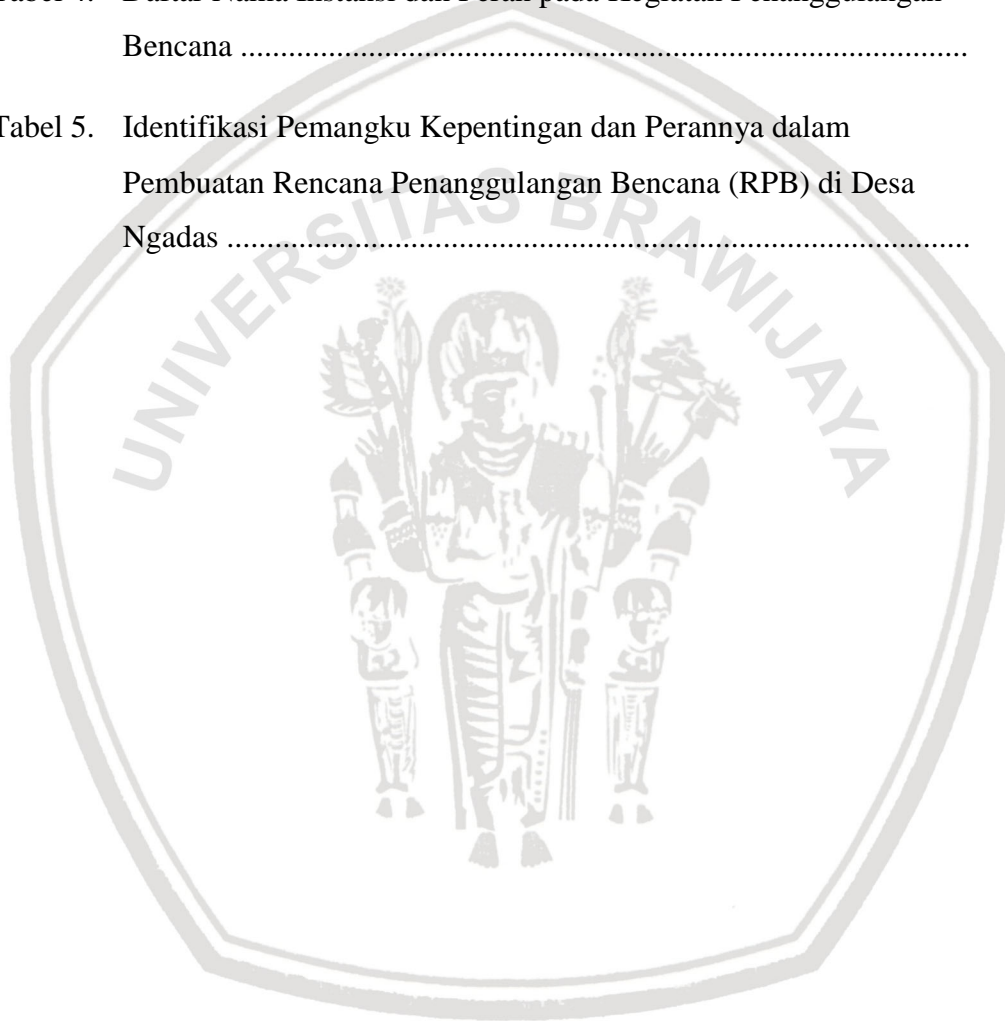
MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kontribusi Penelitian.....	15
E. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan	19
1. Administrasi Publik	19
2. Administrasi Pembangunan	20
B. Teori Kelembagaan.....	21
C. Manajemen Bencana.....	23
1. Manajemen Bencana.....	23
2. Tahapan Manajemen Bencana.....	24
D. Peran BPBD dalam Manajemen Bencana	28
1. BPBD Daerah	28
2. Peran BPBD dan Manajemen Bencana	30
E. Masyarakat Tangguh Bencana.....	37
1. Pemberdayaan Masyarakat	37
2. Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat	40
3. Manajemen Bencana Berbasis Komunitas	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45

B.	Fokus Penelitian	46
C.	Lokasi dan Situs Penelitian.....	47
D.	Sumber Data	48
E.	Teknik Pengumpulan Data	50
F.	Instrumen Penelitian	52
G.	Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		57
A.	Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	57
1.	Letak Geografis Kabupaten Malang	57
2.	Wilayah Administrasi Kabupaten Malang.....	57
3.	Demografi Kabupaten Malang.....	58
4.	Pemerintah Kabupaten Malang.....	60
B.	Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	64
1.	Sejarah BPBD	64
2.	Visi dan Misi BPBD Kabupaten Malang.....	68
3.	Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Malang.....	70
4.	Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Malang.....	72
5.	Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Malang	73
C.	Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	75
1.	Kondisi Geografis Desa Ngadas	75
2.	Kondisi Topografi Desa Ngadas.....	76
3.	Kondisi Iklim Desa Ngadas	76
4.	Kondisi Hidrologi Desa Ngadas	77
5.	Kondisi Ekonomi Desa Ngadas	77
6.	Kondisi Bencana Desa Ngadas	78
D.	Data Fokus Penelitian	79
1.	Penyelenggaraan Manajemen Bencana dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana.....	79
a.	Regulasi tentang Manajemen Bencana dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana.....	79
b.	Tahapan BPBD Kabupaten Malang dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana	83
1)	Membangun Kapasitas dalam Rangka Peningkatan Sumberdaya Manusia BPBD Kabupaten Malang	83
2)	Upaya Sosialisasi Kegiatan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.....	91
3)	Upaya Pelembagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.....	94

4)	Pelibatan Aktor dalam Kegiatan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	96
5)	Pengamatan Hasil atau Manfaat bagi Masyarakat.....	105
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana.....	108
a.	Faktor Pendukung	108
b.	Faktor Penghambat	113
E.	Analisis Data Fokus Penelitian.....	115
1.	Penyelenggaraan Manajemen Bencana dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana	115
a.	Regulasi tentang Manajemen Bencana dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana.....	115
b.	Tahapan BPBD Kabupaten Malang dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana	120
1)	Membangun Kapasitas dalam Rangka Peningkatan Sumberdaya Manusia BPBD Kabupaten Malang	120
2)	Upaya Sosialisasi Kegiatan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.....	124
3)	Upaya Pelembagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	128
4)	Pelibatan Aktor dalam Kegiatan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.....	130
5)	Pengamatan Hasil atau Manfaat bagi Masyarakat	132
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana.....	134
a.	Faktor Pendukung	135
b.	Faktor Penghambat	140
	BAB V PENUTUP.....	142
A.	Kesimpulan.....	142
B.	Saran	147
	DAFTAR PUSTAKA	149
	LAMPIRAN.....	151

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten Malang	7
Tabel 2. Kriteria Manajemen Bencana yang Baik.....	78
Tabel 3. Daftar Nama Peserta Diklat BPBD Kabupaten Malang.....	87
Tabel 4. Daftar Nama Instansi dan Peran pada Kegiatan Penanggulangan Bencana	98
Tabel 5. Identifikasi Pemangku Kepentingan dan Perannya dalam Pembuatan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Desa Ngadas	102



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus Manajemen Bencana 25

Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif 56

Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur 58

Gambar 4. Lambang Kabupaten Malang 61

Gambar 5. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Malang 74

Gambar 6. Peta Administrasi Desa Ngadas 76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana alam nampaknya silih berganti melanda Indonesia, sehingga bagi masyarakat sudah tidak asing lagi dengan istilah gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, kebakaran, dan lain lain. Indonesia dijuluki negara kepulauan yang terletak pada empat lempeng tektonik yaitu lempeng benua asia, benua australia, lempeng samudra hindia, dan samudra pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk tektonik yang memanjang dari Pulau Sumatra, Jawa , Nusa Tenggara, dan Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor (BNPB, 2015)

Indonesia secara geografis, klimatologis, dan demografis, Indonesia terletak pada koordinat $6^{\circ}\text{LU} - 11^{\circ}08^{\circ}\text{LS}$ dan dari $95^{\circ}\text{BT} - 141^{\circ}45\text{BT}$, dan berada diantara 2 benua yaitu Asia dan Australia. Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan. Hal ini dicirikan dengan adanya perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Wilayah Indonesia secara geografis dan geologis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Merupakan Negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu lempeng Euroasia, Australia, lempeng samudra Hindia dan Pasifik

2. Terdapat 130 gunung berapi aktif di Indonesia yang terbagi dalam tipe A, tipe B, dan tipe C. Gunung api yang pernah meletus sekurang-kurangnya satu kali sesudah tahun 1600 dan masih aktif digolongkan sebagai gunung api tipe A, tipe B adalah gunung api yang masih aktif tetapi belum pernah meletus sedangkan tipe C adalah gunung api yang masih diindikasikan sebagai gunung api aktif.

3. Terdapat lebih dari 5000 sungai besar dan kecil yang 30% diantaranya melewati kawasan padat penduduk dan berpotensi terjadinya banjir dan tanah longsor pada saat musim penghujan.

Indonesia sebagai negara dengan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana diharuskan mengetahui berbagai macam bencana yang berpotensi melanda Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang no 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam dan non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana yang disebabkan oleh faktor alam antara lain berupa seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Bencana non alam

adalah bencana yang disebabkan peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi epidemi dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Di dalam ilmu administrasi publik, dikatakan bahwa penanggulangan bencana haruslah diupayakan secara bersama (multi sektoral), dimana Pemerintah daerah (Pemda) langsung menjadi *leading sector*, sementara pemerintah pusat (BNPB) berperan sebagai pendukung manakala pemda sudah tidak mampu menyediakan aneka kebutuhan. Disinilah komunikasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana, diperlukan untuk mengkoordinasikan proses administrasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai payung hukum untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Seringnya situasi bencana melanda masyarakat Indonesia, menjadikannya sebagai *common and public problem* yang menuntut kehadiran tindakan intervensi kolektif sebagaimana menjadi domain administrasi publik. Sebagai pola tindak intervensi yang kolektif, administrasi publik dituntut mampu memainkan peran yang menjadi tanggung jawab dalam manajemen bencana. Pertama, administrasi publik turut bermain secara praktis maupun normatif-regulatif (melalui instrumen kebijakan) dalam berbagai aktifitas pemanfaatan sumber daya. Kedua, administrasi publik bertanggung jawab langsung maupun tidak langsung terhadap situasi yang menciptakan kerugian pada masyarakat. Ketiga, administrasi publik bertanggung

jawab langsung untuk memberikan perlindungan, penanganan dan pencegahan atas berbagai kemungkinan dampak bencana yang terjadi.

Berdasarkan Undang-Undang no 24 Tahun 2007 pasal 2 menyebutkan dampak dari bencana terdapat lima indikator, diantaranya adalah jumlah korban jiwa, kerugian harta dan benda, cakupan wilayah yang terkena bencana, dan dampak ekonomi sosial yang ditimbulkan oleh bencana yang terjadi. Untuk menghadapi bencana perlu dilakukan secara bersama-sama melibatkan banyak aktor di dalamnya, baik peran pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), swasta maupun internasional.

Berkaitan dengan hal ini Indonesia membentuk sebuah badan penanggulangan bencana sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) merupakan lembaga pemerintah non departemen setingkat menteri yang berada dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) memiliki tugas yang diantaranya:

- a. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.

- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat.
- d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- e. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional.
- f. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam melaksanakan tugasnya memiliki dua fungsi sebagaimana telah diatur dalam peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 pasal 3 yaitu :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien.

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Maka dari itu sebagaimana yang telah ditetapkan pada peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki tugas membentuk badan penanggulangan bencana baik di tingkat provinsi maupun Kota/Kabupaten.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan salah satu bentuk bahwa penanggulangan bencana memiliki tujuan sebagaimana telah dijelaskan oleh Undang-Undang No 4 Tahun 2007 pasal 20 bahwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta melakukan Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014 disebutkan bahwa kondisi wilayah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari beberapa pegunungan yang masih aktif, dan dilalui sungai besar, sehingga wilayah ini berpotensi mengalami berbagai jenis bencana, seperti gunung meletus, banjir lahar, banjir bandang dan tanah longsor. Salah satu daerah yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi adalah di Kabupaten Malang.

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2010-2015 Kabupaten Malang merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Malang memiliki kondisi geografis berupa dataran tinggi dan dikelilingi pegunungan. Oleh karena itu Kabupaten Malang memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi, terutama bencana alam seperti tanah longsor, banjir, angin puting beliung, dan berbagai jenis bencana lainnya yang menjadi ancaman bagi masyarakat Kabupaten Malang. Berdasarkan data padatahun 2016 telah tercatat ada 35 kali kejadian bencana tanah longsor di Kabupaten Malang yang menimbulkan korban jiwa. Dalam bencana tanah longsor ini. Berikut ini adalah jumlah kejadian bencana di Kabupaten Malang dalam kurun waktu 2014-2016:

Tabel 1. Data Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten Malang

<i>Jenis Bencana</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Tanah longsor	30	56	35
Puting Beliung	9	10	12
Angin Kencang	24	41	17
Gelombang Pasang	4	4	2
Gempa	1	1	5

Tanah Gerak	3	0	1
Gunung Meletus	1	0	-
Kekeringan	14	15	4
Banjir	10	7	8

Sumber :Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang 2014-2016

Berdasarkan data jumlah kejadian bencana Kabupaten Malang tahun 2014-2016 terdapat sembilan jenis bencana alam yang melanda Kabupaten Malang dalam tiga tahun terakhir. Bencana tanah longsor merupakan bencana yang sering melanda Kabupaten Malang, dapat dilihat pada tabel di atas kurun waktu tahun 2014-2016 bencana tanah longsor terus melanda Kabupaten Malang. Selain bencana tanah longsor, Kabupaten Malang kerap dilanda oleh peristiwa angin puting beliung, pada tahun 2014-2016 angin puting beliung kerap melanda Kabupaten Malang dan setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Selain angin puting beliung, Kabupaten Malang bagian selatan kerap dilanda gelombang pasang, walaupun tiap tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan, akan tetapi seluruh masyarakat yang tinggal di pesisir pantai harus tetap waspada bila terjadi gelombang pasang yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Bencana gempa bumi terjadi karena adanya getaran bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Akumulasi energi penyebab terjadinya gempa bumi dihasilkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Energi yang dihasilkan tersebut kemudian dipancarkan kesegalaarah berupa gelombang gempa bumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. BPBD Kabupaten Malang mencatat di tahun 2016 ini telah terjadi gempa bumi sebanyak lima kali kejadian.

Kabupaten Malang banyak sekali dikelilingi gunung-gunung yang masih aktif dan sangat berpotensi untuk erupsi sewaktu-waktu. Pada akhir tahun 2015 kabupaten malang terkena guyruran abu vulkanik akibat peningkatan aktifitas gunung bromo. Bencana alam kekeringan kerap melanda Kabupaten Malang setiap tahunnya, berdasarkan data kejadian bencana tahun 2014-2016, kejadian bencana kekeringan 2014 terjadi sebanyak 14 kali dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebanyak 15 kali kejadian.

Kabupaten Malang dilewati oleh empat sungai yang diantaranya adalah sungai Berantas, sungai Konto, sungai Lesti dan sungai Amprong yang sangat berpengaruh besar pada sektor perekonomian agraris, akan tetapi bencana banjir sering menjadi ancaman masyarakat Kabupaten Malang yang diakibatkan meluapnya beberapa sungai-sungai yang melintasi kawasan Kabupaten Malang.

Dikarenakan terdapat banyak jenis ancaman bencana alam yang melanda kabupaten Malang, Pemerintah Kabupaten Malang membentuk Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Peraturan Daerah No 4 tahun 2011. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri. Shaluf dalam Kusumasari (2011:19) mendefinisikan manajemen bencana sebagai berikut:

“Manajemen bencana didefinisikan sebagai istilah kolektif yang mencakup semua aspek perencanaan untuk merespon bencana, termasuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana dan sesudah bencana yang mungkin juga merujuk pada manajemen resiko dan konsekuensi bencana. Manajemen bencana meliputi rencana, struktur, serta pengaturan yang dibuat dengan melibatkan usaha dari pemerintah, sukarelawan dan pihak-pihak swastadengan cara yang terkoordinasi dan komprehensif untuk merespon seluruh kebutuhan darurat”

Oleh karena itu manajemen bencana terdiri dari semua perencanaan, pengorganisasian dan mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menangani semua fase bencana sebagai peristiwa alam yang unik (Kelly, 1995).

Bencana alam yang terjadi dalam tahun terakhir mengubah kepedulian pemerintah untuk tetap lebih fokus pada dampak dan pengelolaan bencana secara efektif. Jika hanya pemerintah saja yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana, maka penanggulangan bencana tidak dapat terlaksana secara maksimal dikarenakan pemerintah kurang memberdayakan masyarakat dalam proses menanggulangi bencana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Nasional dikembangkan secara komprehensif dan terpadu dalam suatu forum, yang melibatkan unsur pemerintah, non pemerintah, masyarakat dan masyarakat bisnis dibawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Upaya pemerintah memberikan peran yang lebih besar bagi masyarakat, sebuah pendekatan berbasis masyarakat diciptakan pada tahun 2005 untuk mendorong dan mengundang partisipasi yang lebih aktif dari anggota masyarakat agar dapat menyampaikan ide-ide dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program kesiapan, kesiapsiagaan, darurat respon dan pemulihan *Disaster Preparedness centre Asia* dalam Kusumasari (2011:91)”

Peran masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan bencana maka masyarakat merupakan aktor utama yang mengembangkan dan menerapkan kebijakan penting yang paling sesuai bagi mereka dalam hal penanggulangan bencana. Dengan adanya partisipasi masyarakat, menjadikan masyarakat mengerti bagaimana menanggulangi bencana secara dini, bersiap siaga saat kondisi tanggap darurat, dan mampu untuk melakukan pemulihan pasca bencana sesuai dengan sumberdaya lokal yang ada.

Salah satu bentuk peran pemerintah untuk menanggulangi bencana adalah dengan cara membangun masyarakat tangguh bencana. Berdasarkan peraturan kepala BNPB No 1 tahun 2012 menyebutkan bahwa pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Salah satu peran pemerintah untuk membentuk masyarakat yang tangguh bencana adalah

melalui kebijakan pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No 1 tahun 2012. Desa/kelurahan tangguh bencana adalah :

“Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Desa/Kelurahan tangguh bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan resiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat”.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Kabupaten Malang memiliki tugas untuk mengoptimalkan perannya dalam melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana serta mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangunkesadaran masyarakat dalam upaya mengurangi resiko bencana dalam berbagai aspek.

Guna meningkatkan peran masyarakat untuk melaksanakan penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Malang harus menyiapkan masyarakat yang tangguh bencana, dikarenakan masyarakat merupakan sebuah subjek yang berpartisipasi. Masyarakat diharuskan mengetahui potensi bencana alam di lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini dikarenakan jika bencana alam tersebut terjadi maka masyarakat akan mengetahui gejala bencana tersebut dan masyarakat akan mengetahui bagaimana cara untuk menanggulangnya secara dini.

Peran pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang budaya sadar bencana sangatlah penting, mengingat budaya sadar merupakan langkah awal untuk membangun masyarakat yang tangguh bencana. Peran Pemerintah Kabupaten Malang dalam membangun masyarakat yang tangguh bencana berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kabupaten Malang tahun 2015 adalah dengan menjalankan program pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan sosialisasi penanggulangan bencana di sekolah (PENA Sekolah)

Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana merupakan langkah BPBD Kabupaten Malang untuk memberikan sosialisasi, pemahaman, dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana di lingkungannya dengan sumberdaya yang ada. Kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana di sekolah merupakan langkah BPBD Kabupaten Malang untuk memberikan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan program-program tersebut, diharapkan pemerintah dapat membangun masyarakat yang tangguh bencana secara berkelanjutan dan berdayaguna. Untuk menyiapkan masyarakat yang tangguh bencana, perlu diadakan kegiatan-kegiatan pada tahap pra bencana yang erat kaitannya dengan istilah mitigasi bencana.

“Mitigasi bencana memfokuskan pada pengenalan daerah rawan ancaman bencana dan pola perilaku individual/masyarakat yang rentan terhadap bencana. Tujuan utama mitigasi terhadap ancaman bencana dilakukan antara lain melalui pembuatan bangunan, sedangkan mitigasi terhadap perilaku yang rentan dilakukan

antara lain melalui relokasi pemukiman, peraturan-peraturan bangunan dan penataan ruang (Nurjanah dkk 2011:40)".

Penanggulangan bencana merupakan kepentingan bersama, baik pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat, dengan adanya penanggulangan bencana ini maka besar harapan jika terjadi bencana maka baik pemerintah maupun masyarakat bisa meminimalisir jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, dan yang terpenting dari proses penanggulan bencana ini adalah langkah pemerintah daerah untuk mengantisipasi bencana dan mengurangi dampak dari bencana tersebut sehingga kerugian-kerugian yang ditimbulkan bisa diminimalisir dan upaya pemulihan pasca bencana bisa terselenggara dengan cepat dan tepat sasaran.

Di Kabupaten Malang terdapat sebuah desa yang masyarakatnya sudah memiliki tingkat kepedulian terhadap bencana yang cukup tinggi, yaitu Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Desa Ngadas merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Malang yang secara posisi menempati daerah yang rawan bencana karena letaknya berada di wilayah dua gunung aktif yaitu gunung bromo dan gunung semeru. Pada akhir tahun 2015 tepatnya bulan desember, Desa Ngadas terdampak guyuran abu vulkanik yang disemburkan gunung bromo, akan tetapi dikarenakan masyarakat di Desa Ngadas telah memiliki kesadaran bahwa di wilayahnya memiliki salah satu tingkat kerawanan bencana, maka para warga sekitar mampu menyelamatkan diri sesuai dengan prosedur dari BPBD Kabupaten Malang. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

“Penyelenggaraan Manajemen Bencana dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana di Kabupaten Malang”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelenggaraan manajemen bencana dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang?
2. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat penyelenggaraan manajemen bencana dalam membangun masyarakat tangguh bencana di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis penyelenggaraan manajemen bencana dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
2. Mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat penyelenggaraan manajemen bencana dalam membangun masyarakat tangguh bencana di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat, diantaranya :

1. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi perbandingan untuk penelitian selanjutnya demi menambah pengetahuan pembaca mengenai manajemen bencana berbasis masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai sarana memperdalam pengetahuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan terutama yang berhubungan dengan judul penelitian ini yaitu mengenai BPBD Kabupaten Malang dalam membangun masyarakat tangguh bencana dalam rangka menuju masyarakat tangguh bencana.

b. Bagi akademis

Sebagai sarana peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen bencana.

c. Bagi organisasi

Sebagai bahan kajian sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran atau masukan dan informasi bagi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang mengenai pembangunan masyarakat tangguh bencana.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, penulis menguraikan garis besar mengenai latar belakang pengambilan judul penelitian, perumusan masalah, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan yang terkait dengan penyelenggaraan manajemen bencana dalam membangun masyarakat tangguh bencana.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan secara lebih dalam teori-teori yang melandasi penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan mengenai penyelenggaraan manajemen bencana dalam membangun masyarakat tangguh bencana.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang penulis gunakan dalam proses penelitian yang terkait dengan penyelenggaraan manajemen bencana dalam membangun masyarakat tangguh bencana Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan secara lebih dalam mengenai penyajian data penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan mengenai penyelenggaraan manajemen bencana dalam membangun masyarakat tangguh bencana.

BAB V : KESIMPULAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan terkait dengan penyelenggaraan manajemen bencana dalam membangun masyarakat tangguh bencana Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

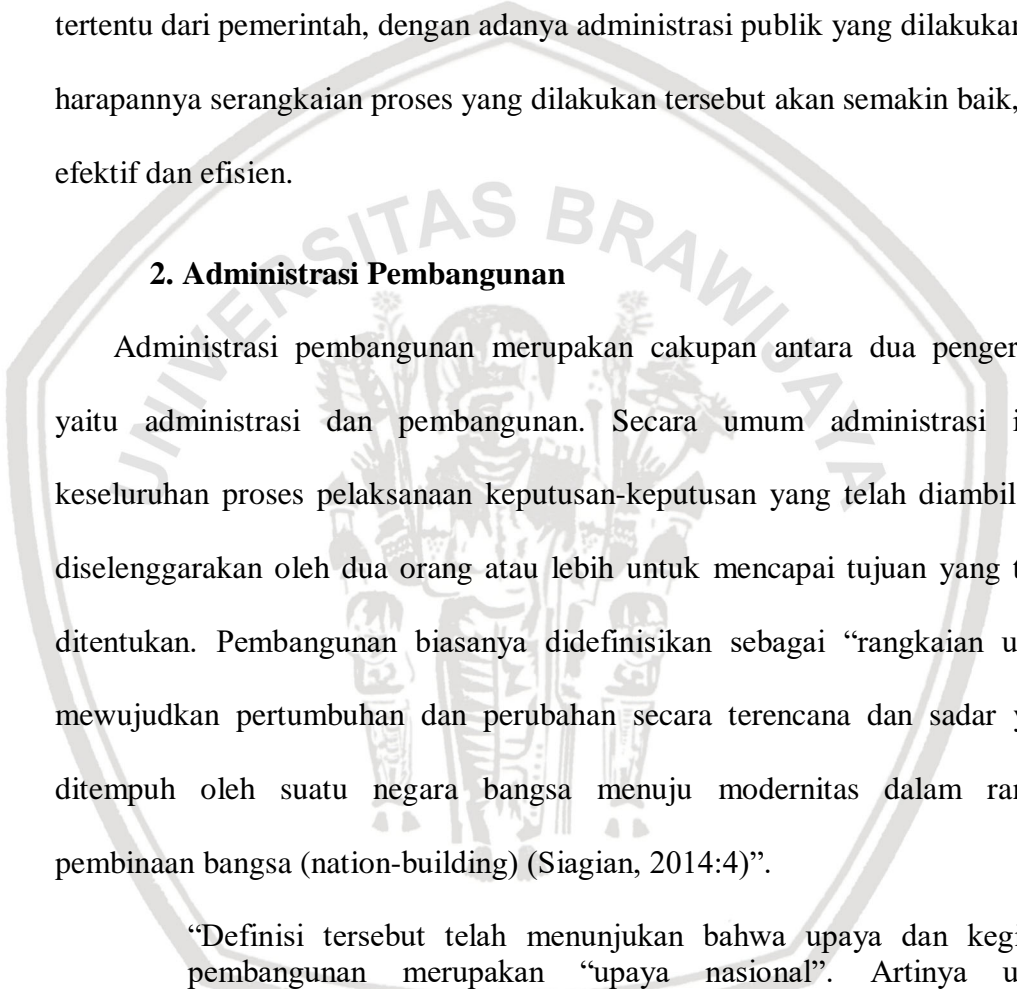
Dalam Kamus Webster administrasi publik berarti *public administration* yang diartikan sebagai “*branch of political science dealing primarily with the structure and workings of agencies charged with the administration of government function*” (cabang ilmu politik yang berurusan dengan struktur dan cara kerja lembaga yang dibebankan pada administrasi fungsi pemerintah). Adapun beberapa istilah administrasi publik yang diungkapkan oleh beberapa ahli:

- John M. Pfinner & Robert V. Presthus menyebutkan administrasi publik yaitu (1) “*public administration involves the implementation of public policy which has been determined by representative political bodies*” (administrasi publik meliputi kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik); (2) “*public administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy, it is mainly occupied with the daily work of government*” (administrasi publik dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah);
- Felix A. Nigro & Lloyd G. Nigro mengatakan administrasi adalah : (1) “*cooperative group effort in public setting*” (suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan) (2) “*covers all three branches: executive, legislative and judicial, and their interrelationship*” (meliputi ketiga cabang pemerintahan : eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan diantaranya);
- George J. Gordon : administrasi publik merupakan seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang

dikeluarkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan peradilan. (Sjamsuddin, 2006:114-117)

Beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa administrasi publik adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu kebijakan tertentu dari pemerintah, dengan adanya administrasi publik yang dilakukan harapannya serangkaian proses yang dilakukan tersebut akan semakin baik, efektif dan efisien.

2. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan cakupan antara dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Secara umum administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “rangkaiian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building) (Siagian, 2014:4)”.

“Definisi tersebut telah menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan “upaya nasional”. Artinya untuk melaksanakan sebuah kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya meskipun harus diakui bahwa peran pemerintah cukup dominan (Siagian, 2014:4)”.

Batasan pengertian atau definisi dari administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi

kehidupan dan penghidupan Negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya (Siagian 2014:5). Definisi ini secara implisit menunjukkan bahwa upaya dari kegiatan pembangunan merupakan “upaya nasional”. Untuk menyelenggarakan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya meskipun harus diakui bahwa peran pemerintah sangat dominan

Oleh karena itu, administrasi untuk proses pembangunan sangatlah penting dilakukan mengingat pembangunan nasional yang menjadi program pemerintah dapat dilakukan dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, maka cara yang diperlukan adalah bagaimana mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut. Administrasi memiliki fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah untuk mencapainya.

B. Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*)

Teori kelembagaan adalah terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Dasar utama dalam pemikiran teori kelembagaan menurut Glynn dan Azbug, dalam Kusumasari (2014:48) adalah lembaga menginginkan adanya dasar hukum (legitimasi) eksternal dengan memenuhi konteks kelembagaan mereka. Legitimasi eksternal dapat berasal dari faktor-faktor sosial dan budaya yang

dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk memainkan peran tertentu dalam masyarakat.

“Kostova et.al dalam Kusumasari (2014:49) menambahkan bahwa pengaturan kelembagaan dibentuk oleh budaya lokal sehingga pengaturan itu menjadi sebuah kekhususan lokal. Berdasarkan pemaparan diatas bahwa teori kelembagaan menyediakan lensa teoritis agar peneliti dapat meneliti dan mengidentifikasi sebuah isu yang ada, dengan mengenali dasar sosial dan budaa dari pengaruh eksternal terhadap organisasi”.

Teori kelembagaan telah digunakan untuk menjelaskan tindakan individu dan tindakan kelembagaan, serta aspek praktik administrasi dan manajemen tolbert dan zucker, dalam kusumasari (2014:49). Teori variabel kelembagaan mencerminkan pola faktor budaya yang berkembang dari waktu ke waktu dan menjadi legitimasi dalam suatu institusi dan masyarakat. Karena pengaturan kelembagaan menentukan konteks sosial dari institusi dan lingkungan mereka, maka pengaturan kelembagaan tersebut akan selalu membentuk tindakan dari pejabat publik.

Salah satu keberhasilan tindakan manajemen adalah pada pengaturan kelembagaan yang tepat. Pengaturan kelembagaan yang tepat dapat menghasilkan kegiatan manajemen bencana yang berkualitas. Pengaturan kelembagaan menurut (Kusumasari 2014:33) dijelaskan sebagai berikut :

“Pengaturan kelembagaan merupakan faktor penentu yang sangat pentingdalam keberhasilan manajemen bencana, terutama dalam kondisi ketika pemerintah yang bertanggung jawab tidak memiliki otoritas atau dapat menyebabkan ketidakjelasan distribusi kekuasaan otoritas dan penundaan pembuatan keputusan, terutama dalam hal bantuan darurat dan rehabilitasi. Harus ada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan kebijakan dengan baik”.

Keberhasilan manajemen bencana salah satunya ditentukan oleh pengaturan kelembagaan yang kuat, hal ini dikarenakan kerjasama antar lembaga pada proses penanggulangan bencana, baik pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana tidak dapat dipisahkan. Hubungan yang baik antar lembaga baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mempermudah proses penanggulangan bencana pada saat kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

C. Manajemen Bencana

1. Manajemen Bencana

Bencana yang silih berganti melanda Indonesia, mengharuskan pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan kebencanaan di Indonesia, baik bencana yang ditimbulkan oleh faktor alam maupun non alam perlu diatasi dengan cepat, tepat sasaran, terpadu dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satu studi yang mempelajari tentang bencana adalah Manajemen Bencana (*Disaster Management*). Manajemen bencana adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana dengan segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama resiko bencana dan bagaimana menghindari resiko bencana (Nurjanah dkk 2011:42).

Manajemen bencana terdiri dari semua perencanaan, pengorganisasian dan mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi semua fase bencana

sebagai peristiwa alam yang unik (Kelly, 1995). Shaluf dalam Kusumasari (2014:19) juga mendefinisikan manajemen bencana, yaitu:

“Manajemen bencana didefinisikan sebagai istilah kolektif yang mencakup semua aspek perencanaan untuk merespon bencana, termasuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana dan setelah bencana yang mungkin juga merujuk pada manajemen resiko dan konsekuensi bencana. Manajemen bencana meliputi rencana, struktur, serta pengaturan yang dibuat dengan melibatkan usaha dari pemerintah, sukarelawan, dan pihak-pihak swasta dengan cara yang terkoordinasi dan komprehensif untuk merespon seluruh kebutuhan darurat”.

Manajemen bencana merupakan sebuah siklus aktivitas yang berkelanjutan, tanpa tergantung dari terjadi tidaknya suatu bencana. Saat tidak terjadi bencana merupakan kesempatan untuk menyusun aktifitas manajemen bencana yang lebih baik. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen bencana merupakan salah satu upaya manusia untuk dapat mengurangi dampak dari berbagai macam bencana, dengan cara menyiapkan diri sebelum datangnya bencana, bersikap waspada pada saat situasi berpotensi bencana, tanggap darurat saat terjadi bencana dan pemulihan dengan cepat sesudah terjadi bencana.

2. Tahapan Manajemen Bencana

Dalam pelaksanaan manajemen bencana, ada beberapa tahapan-tahapan bencana yang harus dilaksanakan yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, respons dan pemulihan. Tahapan-tahapan ini yang dikenal sebagai siklus manajemen bencana. Mitigasi didefinisikan sebagai tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi, dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak

bencana terhadap masyarakat dan lingkungan King dalam Kusumasari (2014:22). Sedangkan menurut Coppola dalam Kusumasari (2014:22) menjelaskan bahwa mitigasi dapat dilihat sebagai upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana melalui pengurangan kemungkinan dan komponen konsekuensi resiko bencana.

Manajemen bencana setidaknya memiliki empat tahapan yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Siklus Manajemen Bencana
Sumber: Panduan Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana (Edisi Kedua), BNPB 2011

Gambar diatas menjelaskan bahwa tujuan pencegahan dan mitigasi adalah untuk pengurangan kemungkinan resiko, menghindari resiko, penerimaan resiko, serta transfer, pembagian, atau penyebarluasan resiko dalam (Kusumasari, 2014:22). Ada dua jenis mitigasi, yaitu struktural dan nonstruktural, mitigasi struktural didefinisikan sebagai usaha pengurangan



resiko yang dilakukan melalui pembangunan fisik melalui solusi yang dirancang Coppola dalam Kusumasari (2014:23).

Mitigasi nonstruktural dikenal sebagai upaya pengurangan kemungkinan atau konsekuensi resiko melalui modifikasi proses-proses perilaku manusia atau alam, tanpa membutuhkan penggunaan struktur yang dirancang. Teknik ini dianggap sebagai cara manusia menyesuaikan diri dengan alam. Di dalam teknik ini terdapat langkah-langkah regulasi, program pendidikan, dan kesadaran masyarakat Kusumasari (2014:23). Adapun hambatan-hambatan dalam proses mitigasi ini, seperti biaya, rendahnya dukungan politik, isu-isu sosial budaya, dan persepsi resiko Mileti dalam Kusumasari (2014:23).

Kesiapsiagaan (*preparedness*) berarti merencanakan tindakan untuk merespon jika terjadi bencana. Kesiapsiagaan dapat juga didefinisikan sebagai keadaan siap siaga dalam menghadapi krisis, bencana atau keadaan darurat lainnya. Godschalk dalam Kusumasari (2014:23) menekankan kesiapsiagaan sebagai tindakan yang diambil sebelum kondisi darurat untuk mengembangkan kemampuan operasional dan untuk memfasilitasi respons yang efektif jika keadaan darurat terjadi.

Gillespie dan Streeter dalam Kusumasari (2014:24) mendefinisikan kesiapsiagaan sebagai perencanaan, identifikasi sumber daya, sistem peringatan, pelatihan, stimulasi dan tindakan prabencana lainnya yang diambil untuk tujuan utama meningkatkan keamanan dan efektifitas respon masyarakat selama bencana. Pada intinya kesiapsiagaan merupakan kesiapan kita untuk menghadapi bencana yang akan terjadi dengan kegiatan dan langkah-langkah

yang diambil sebelum terjadinya bencana untuk memastikan adanya respons yang efektif.

Respons atau tanggap darurat juga dikenal sebagai tindakan yang dilakukan segera, sebelum, selama dan setelah bencana itu terjadi. Kegiatan respons atau daya tanggap ini memiliki tujuan untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi kerusakan, kerugian harta dan benda, dan meningkatkan pemulihan awal dari insiden tersebut Shaluf, dalam Kusumasari (2014:28).

Kegiatan respons ini meliputi pemberian bantuan atau intervensi selama atau segera setelah bencana terjadi, serta memenuhi kelestarian hidup dan kebutuhan dasar hidup masyarakat yang terkena dampak. Kunci utama pada tahap respons ini meliputi kegiatan kesiapsiagaan di daerah rawan, keterlibatan masyarakat lokal, koordinasi penilaian dan kebutuhan, serta berbagi informasi antara berbagai pihak dan ahli logistik Perry dalam Kusumasari (2014:28).

Tahapan terakhir manajemen bencana adalah pemulihan (*recovery*). Pemulihan merupakan kegiatan untuk mengembalikan sistem infrastruktur pada standar operasi minimal dan panduan upaya jangka panjang yang direncanakan untuk mengembalikan kehidupan yang lebih baik pasca bencana (Kusumasari 2014:30). Pemulihan bencana dimulai sesaat setelah bencana terjadi Sullivan dalam Kusumasari (2014:30). Pemulihan bencana adalah saat dimana negara, masyarakat, keluarga, individu memperbaiki atau merekonstruksi kembali apa yang telah hilang akibat bencana dan mengurangi resiko bencana yang serupa di masa mendatang Coppola dalam Kusumasari (2014:30).

Proses pemulihan dapat dibagi menjadi kegiatan jangka pendek dan jangka panjang. Tahap pemulihan jangka pendek dilakukan segera setelah bencana terjadi dengan tujuan menstabilkan kehidupan mereka yang terkena dampak dari bencana. Pemulihan ini dalam rangka mempersiapkan diri mereka untuk menjalani perjalanan panjang menuju pembangunan kembali kehidupan mereka setelah bencana (Kusumasari 2014:31).

“kegiatan pemulihan dalam jangka panjang tidak dimulai sampai fase darurat bencana terakhir, yaitu disaat masyarakat mulai merehabilitasi dan membangun kembali. Dalam banyak kasus bahkan telah ditemukan bahwa sebuah masyarakat perlu dibangun kembali dengan mengakomodasi informasi-informasi baru tentang bencana sambil tetap mempertahankan sebanyak mungkin keaslian budaya dan kondisi masyarakat seperti sebelum terjadi bencana (Kusumasari 2014:31)”.

Dalam proses pemulihan, perlu dilaksanakan dengan waktu yang sedikit. Proses pemulihan memerlukan pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan, ekonomi, teknik, masyarakat, dan kebijakan publik. Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa titik lemah dari tahapan manajemen bencana berada di kegiatan sebelum atau prabencana terjadi, sehingga hal ini yang perlu ditingkatkan untuk menghindari dampak bencana yang lebih besar, dan dapat memperkecil jumlah korban jiwa.

D. Peran BPBD dalam Manajemen Bencana

1. BPBD Daerah

Berbicara mengenai pemerintah daerah dan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dari paradigma *New Public Management* (NPM) atau manajemen publik baru. NPM adalah reaksi terhadap kelemahan yang dirasakan dari

paradigma birokrasi administrasi publik tradisional serta mencakup sebuah kritik terhadap bentuk monopoli penyediaan layanan dan sebuah argumen untuk penyedia layanan yang lebih luas dan lebih pada pendekatan orientasi pasar untuk manajemen Stoker dalam Kusumasari (2014:55).

Menurut Hood dalam Kusumasari (2014:55) komponen utama dari paradigma NPM adalah :

“Hands-on professional management (pelaksanaan tugas manajemen pemerintah diserahkan kepada manajer profesional), standar dan ukuran kinerja yang lebih jelas, lebih ditekankan pada kontrol atau hasil keluaran, pembagian tugas pada unit-unit yang berada dibawahnya, persaingan yang lebih besar dalam sektor publik, penerapan gaya manajemen sktor swasta, disiplin yang tinggi, dan todak boros dalam menggunakan berbagai sumber”.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Hughes dalam Kusumasari (2014:55) mengartikulasikan karakteristik NPM sebagai manajemen yang fungsi tatanannya lebih tinggi daripada prinsip-prinsip administrasi dan ekonomi yang dapat membantu manajemen publik dan teori serta praktik-praktik manajemen modern meningkatkan manajemen publik dan pemberian pelayanan.

Raadschelders dalam Kusumasari (2014:57) memberikan penjelasan bahwa desentralisasi sebagai salah satu tema utama NPM telah dikembangkan dan disebarluaskan sejak tahun 1990-an dengan mempertimbangkan pertumbuhan pemerintah daerah dan peran pentingnya. Desentralisasi mendorong pergeseran kekuasaan dan sumber daya dari pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah pihak yang bergerak dalam pelaksanaan

administrasi rutin, memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta rencana pengembangan ekonomi.

“Wacana tentang desentralisasi di negara berkembang yaitu desentralisasi menekankan pada struktur, peran, dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai efektifitas kekuasaan pusat dan keuntungan dari desentralisasi otoritas kepada lembaga pemerintahan daerah dalam mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial untuk kepentingan masyarakat Chemma dan Rondinelli dalam Kusumasari (2014:57)”.

Desentralisasi telah menciptakan tanggung jawab dan harapan baru untuk lembaga pemerintah daerah dan proses penciptaan tersebut telah membawa sumber daya dan kekuatan baru yang signifikan untuk pengambilan keputusan di pemerintah daerah. Olowu dalam Kusumasari (2014:57) menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah lingkungan pemerintahan yang terdiri dari manajemen dan administrasi masyarakat lokal, meliputi struktur politik dan birokrasi, serta proses yang mengatur dan mempromosikan masyarakat.

2. Peran BPBD dan Manajemen Bencana

Peranan merupakan asal kata dari peran yang berarti sesuatu yang memegang pimpinan yang utama. Peranan atau *role* sering diartikan sebagai suatu kelakuan yang diharapkan dari oknum dalam hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu. Hubungan peranan dalam pemerintahan daerah adalah antara tugas dan wewenang pemerintah yang memiliki tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu agar pemerintah mendapatkan apa yang ingin dicapai, maka pemerintah harus menjalankan peranannya dengan baik. Soerjono, (2013:212) menjelaskan bahwa peranan

(*role*) merupakan aspek dinamis sebuah kedudukan (*status*). Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan sebuah peranan.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku.

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan, Soerjono, (2013:213) memberikan penjelasan bahwa sebuah peranan mencakup 3 hal, yaitu :

- a) Peranan mengikuti norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi,
- c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan dimaksudkan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan aktif dalam suatu pencapaian yang dilakukan oleh individu atau kelompok.

Fasilitas-fasilitas bagi peranan individu (*role-facilities*). Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan. Kadang perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas bertambah.

Banyak para ahli mengemukakan tentang manajemen bencana di tingkat pemerintah daerah, hal ini disebabkan oleh beberapa macam alasan sebagai berikut. (1) manajemen bencana diimplementasikan oleh pemerintah daerah (Perry dan Mushkatel dalam Kusumasari, 2014:60). (2) adanya pemahaman yang berkembang bahwa pemerintah daerah memainkan peran yang paling aktif dalam operasi darurat bencana (Herman dan Labadie dalam Kusumasari, 2014:60). (3) adanya pergeseran pelimpahan kekuasaan dan wewenang sari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam hal kegiatan bencana (Mei dalam Kusumasari, 2014:61). (4) adanya kebutuhan yang berkembang untuk mengadopsi dan mengembangkan rasa lokalitas dalam perencanaan darurat bencana karena pemerintah daerah memegang tanggung jawab yang sangat penting dalam manajemen darurat bencana (Cigler, Somers dan svara dalam Kusumasari 2015:61). (5) serta lebih cepat dan efektif menanggapi bencana (Kapucu et.al. dalam Kusumasari, 2014:61).

Tujuan pemerintah dalam pengelolaan bencana juga diungkapkan oleh Solway dalam Kusumasari (2016:61) terdapat tujuh hal dalam pengelolaan bencana, antara lain:

1. Mengidentifikasi orang dan wilayah yang rentan bencana dalam lingkup kabupaten.
2. Memastikan bahwa semua anggota masyarakat sadar proses potensi dampak bencana alam.
3. Membagikan saran dan panduan praktik yang baik kepada masyarakat untuk mitigasi bencana.
4. Menjaga hubungan dengan para pejabat yang bertanggung jawab dalam perencanaan, kesehatan, dan kesejahteraan dengan mengeluarkan peringatan atau sistem pengendalian massa dan kebakaran.
5. Memastikan bahwa anggota masyarakat menerima pelatihan *first aid* atau pertolongan pertama yang sesuai.
6. Melaksanakan program pendidikan dan penyadaran masyarakat melalui kegiatan yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah setempat, dan
7. Mengidentifikasi *rule* evakuasi dan lokasi yang aman serta lokasi pengungsi.

Bencana yang timbul dapat memunculkan kondisi krisis bagi pemerintah daerah karena harus menghadapi ketidakpastian. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan daerah yang mungkin tidak sesuai

dengan paradigma yang ada saat ini yang menyatakan bahwa bencana sebagai produk alam. Pemerintah daerah harus menyiapkan sebuah rencana perubahan dan adaptasi yang cepat, hal ini merupakan cara untuk menghadapi kejadian yang tidak terduga. Akan tetapi kebanyakan respons bencana yang dilakukan pemerintah daerah bergantung pada manajemen *command and control* (perintah dan kontrol) yang mengikuti pendekatan terstruktur (Neal dan Philips dalam Kusumasari 2014:61-62).

Birokrasi di tingkat daerah dirancang untuk menerima desentralisasi tanggung jawab dari pemerintah pusat dengan fokus pada tujuan jangka pendek serta menciptakan peran dan fungsi kerja yang khusus. Takeda dan Helms dalam Kusumasari (2014:62) memberikan penjelasan tentang kemampuan sebuah birokrasi untuk mengatasi bencana yaitu :

“kemampuan yang harus dimiliki birokrasi untuk mengatasi bencana adalah bahwa birokrasi harus mengadopsi model manajemen holistik yang didukung dengan pembelajaran secara terus menerus, bisa beradaptasi terhadap perubahan, memiliki fokus jangka panjang, kecilnya tingkat kesalahan, serta kemampuan yang tinggi untuk menggabungkan informasi dalam pembelajaran”.

Takeda dan Helms dalam Kusumasari (2014:62) berpendapat bahwa kegagalan pendekatan birokratis dihasilkan dari kombinasi pengetahuan desentralisasi dengan pengambilan keputusan yang terpusat, dan cenderung mengabaikan informasi dari luar. Sistem manajemen birokrasi tergantung pada pembuatan keputusan secara berkelompok karena perannya diformalkan dan informasinya dimodifikasi. Pendekatan ini dapat mengakibatkan adanya upaya

mempertahankan orang yang memiliki keahlian terbatas (Kusumasari 2014:62).

Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana di tingkat daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pasal 20 peran pemerintah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien.
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana merupakan kunci keberhasilan penanggulangan bencana. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah baik dari segi pengetahuan, keahlian, perilaku dan karakteristik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan manajemen bencana. Peningkatan sumberdaya aparatur pemerintah bias dilaksanakan dengan cara membangun kapasitas sumber daya pemerintah di bidang manajemen bencana.

Berbagai ahli berpendapat tentang pembangunan kapasitas menjelaskan bahwa pembangunan kapasitas merupakan upaya yang dimaksudkan

mengembangkan suatu ragam strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsifitas kinerja organisasi (Santoso dkk 2012:38). Sedangkan menurut Grindle dalam Santoso dkk (2012:39) menjelaskan bahwa pembangunan kapasitas dijelaskan sebagai berikut :

“Capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance”.

Untuk mewujudkan pembangunan kapasitas dari kinerja pemerintah, diperlukan pula peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dari pemerintah tersebut. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah ditujukan untuk memberikan keterampilan yang lebih dan lebih mengutamakan praktik daripada teori. Kompetensi sumber daya aparatur dalam organisasi sektor publik mempunyai kedudukan atau fungsi yang sangat penting, sebab seiring dengan perjalanan waktu, semakin banyak kebutuhan-kebutuhan dan tantangan baru yang berkembang dengan pesat, sehingga membutuhkan penanganan serius dan maksimal (Saleh, et.al 2003:21).

Pada proses manajemen bencana, pemerintah harus memiliki sumber daya yang memiliki kemampuan lebih untuk melaksanakan perannya sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana. Dengan adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah di bidang manajemen bencana, maka dapat dipastikan proses manajemen bencana tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan para sumber dayanya memiliki kemampuan lebih

yang sudah didapatkan melalui berbagai macam pelatihan-pelatihan. Proses penanggulangan bencana merupakan kepentingan bersama, peran pemerintah daerah dalam mengelola bencana perlu didukung oleh semua unsure masyarakat. Peningkatan kapasitas sumber daya pemerintah jika secara terus menerus dilakukan dapat membantu masyarakat dan dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat di bidang manajemen bencana.

E. Masyarakat Tangguh Bencana

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses memberdayakan masyarakat baik di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, agar masyarakat menjadi mandiri dan dapat mengatur masa depannya sendiri. Unsur pertama dari pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat (Soetomo, 2011:88). Kewenangan dan kapasitas merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, karena kedua unsur ini memiliki hubungan yang sangat erat. Jika masyarakat mempunyai kewenangan, akan tetapi tidak didukung dengan kapasitas maka hasilnya tidak akan maksimal (Soetomo, 2011:88).

Untuk memperoleh kewenangan dan kapasitas dalam mengelola pembangunan, masyarakat perlu diberdayakan melalui proses pemberdayaan atau *empowerment* (Soetomo, 2011:88). Pemberdayaan masyarakat sebenarnya

mengacu pada kata “*empowerment*”, yaitu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

“Pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan menekankan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*self-reliant communities*) sebagai suatu system yang mengorganisasikan diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat seperti itu diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai objek tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka. Wahyono, et al. dalam Surjono dan Nugroho (2008:25)”.

Proses pemberdayaan masyarakat diperlukan berbagai macam pendekatan, agar dalam proses pemberdayaan masyarakat tidak merasa curiga. Tokoh gerakan pembangunan masyarakat China Yen, dalam surjono dan Nugroho (2008:27-28) mengatakan bahwa setiap penggerak pembangunan yang akan memberdayakan masyarakat harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. *Go to people*, mendatangi masyarakat yang hendak diberdayakan.
2. *Live among the people*, hidup dan tinggallah dengan mereka agar kita mengenal dengan baik kepentingan dan kebutuhannya.
3. *Learn from the people*, belajarlh dari mereka supaya dapat dipahami apa yang ada dibenak mereka, potensi apa yang mereka miliki.
4. *Plan with the people*, ajak dan ikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan.
5. *Work with the people*, ajak dan libatkan mereka dalam proses pelaksanaan rencana.
6. *Start with what the people knows*, mulailah dari apa yang masyarakat ketahui dan pahami.

7. *Build on what the people have*, bangunlah sesuatu dari modal yang dimiliki masyarakat.
8. *Teach by showing, learn by doing*, ajarilah masyarakat dengan contoh konkret/nyata.
9. *Not a showcase, but a pattern*, mereka jangan dipamerkan dengan sesuatu yang menyilaukan, tetapi berikanlah kepada mereka suatu pola.
10. *Not odds and ends, but a system*, jangan tunjukan kepada mereka sesuatu yang aneh dan akhir dari segalanya, tetapi berikanlah kepada mereka suatu sistem yang baik dan benar.
11. *Not peacemeal, but intergrated approach*, jangan menggunakan pendekatan yang sepotong-sepotong, tetapi pendekatan menyeluruh dan terpadu.
12. *Not to conform but the transform*, bukan penyesuaian cara / model, tetapi transformasi model.
13. *Not relief but release*, jangan berikan penyelesaian akhir kepada mereka, tetapi beri kebebasan kepada mereka sendiri untuk menyelesaikan masalahnya.

Konsep pemberdayaan masyarakat biasanya selalu dihubungkan dengan konsep partisipasi. Dengan partisipasi, pembangunan dapat menjangkau masyarakat terlemah melalui upaya membangkitkan semangat hidup untuk menolong diri sendiri. Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat terkait

dengan efektifitas, efisiensi, kemandirian dan jaminan bagi pembangunan yang berkelanjutan (surjono dan Nugroho 2008:28).

Masyarakat merupakan salah satu aktor dalam penanggulangan bencana, pemerintah perlu memberdayakan masyarakat di bidang kebencanaan dikarenakan, masyarakat yang merasakan langsung dampak tersebut. Untuk mengurangi dampak dari bencana tersebut, pemerintah harus memberdayakan masyarakat di bidang penanggulangan bencana.

2. Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha, untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, memberikan kekuatan kepada masyarakat, memberikan kemampuan kepada masyarakat sebagai penunjang kehidupan masyarakat di masa yang akan datang. Proses pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta menjadi aktor dalam setiap usaha-usaha pembangunan baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Pemberdayaan masyarakat dalam manajemen bencana, merupakan peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah untuk memberdayakan masyarakat di bidang manajemen bencana. Pemberdayaan masyarakat di bidang manajemen bencana dikenal dengan istilah Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat. Manajemen Bencana berbasis masyarakat, lebih memfokuskan masyarakat sebagai aktor utama yang mengembangkan dan

menerapkan kebijakan penting yang paling sesuai bagi mereka dalam hal penanggulangan bencana (Kusumasari, 2014:91)

Pemberdayaan masyarakat di bidang manajemen bencana dilaksanakan pemerintah melalui program pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No 1 tahun 2012 tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan apabila terkena bencana.

3. Manajemen Bencana Berbasis Komunitas

Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dilakukan melalui penyadaran, peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana dan atau penerapan upaya fisik dan nonfisik yang dilakukan anggota masyarakat secara aktif, partisipatif dan terorganisir. Suatu komunitas dalam konteks manajemen bencana dapat diartikan sebagai sebuah kelompok masyarakat yang mempunyai satu atau dua kesamaan, seperti tinggal di lingkungan yang sama, terpapar risiko bahaya yang serupa, atau sama-sama telah terkena dampak suatu bencana (Ulum, 2014:39).

Manajemen bencana berbasis komunitas merupakan manajemen bencana yang mempromosikan pendekatan *bottom up* yang bekerja selaras dengan pendekatan *top down* untuk menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Menurut (Ulum, 2014:41) dijelaskan bahwa agar pelaksanaannya

efektif, maka komunitas lokal harus didukung dalam menganalisis kondisi berbahaya, kerentanan dan kapasitas mereka saat mempersepsi diri mereka sendiri. Melalui pendekatan manajemen bencana berbasis komunitas akan diperkuat untuk memungkinkan mereka melakukan semua program manajemen bencana, termasuk dalam konteks kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.

Dengan pendekatan manajemen bencana berbasis komunitas, dapat mengakui bahwa *stakeholder* yang lain harus terlibat dalam proses, dengan tujuan akhir untuk mencapai kapasitas sumber daya manusia, khususnya pihak atau komunitas yang rentan terhadap bencana Pandey dan Okazaki dalam Ulum (2014:42). Pendekatan manajemen bencana berbasis komunitas memiliki tujuan untuk mengurangi kerentanan dan menguatkan kapasitas komunitas dalam manajemen bencana. Tujuan utama dalam manajemen bencana berbasis komunitas ini adalah untuk memberdayakan masyarakat (lokal) dengan mendukung mereka untuk semakin mandiri (Ulum, 2014:42)

Pada Praktiknya, manajemen bencana berbasis komunitas masih memiliki kelemahan pada proses pelaksanaannya, Menurut (Ulum, 2014: 43-44) setidaknya ada empat kelemahan yang harus dihadapi dalam melaksanakan manajemen bencana berbasis komunitas, antara lain

1. Tantangan

Tantangan utama pelaksanaan manajemen bencana berbasis komunitas adalah keberlanjutan upaya yang dilakukan di tingkat masyarakat dan integrasi isu di tingkat kebijakan. Agar efektif dan membuat dampak yang

berkelanjutan, penerapan manajemen bencana berbasis komunitas harus melampaui inisiatif masyarakat lokal, LSM dan pemerintah Daerah. Sebagai bagian dari advokasi pemerintahan yang lebih responsif dan efektif, pemerintah tingkat pusat dan negara harus memadukan manajemen bencana berbasis komunitas dalam kebijakan mereka dan melaksanakan prosedur. Panilaian kerentanan dan kapasitas merupakan komponen utama dalam manajemen bencana berbasis komunitas, karena harus terkait dengan situasi dan kondisi dari masyarakat lokal.

2. Pendekatan

Pendekatan manajemen bencana berbasis komunitas diawali untuk mengatasi penyebab kerentanan sebagai bagian dari upaya pembangunan yang lebih luas dan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan luar, memobilisasi relawan dan target yuang paling rentan, peningkatan masyarakat sipil dan tanggapan pemerintah terhadap bencana, melindungi dan menjamin pembangunan sosial ekonomi yang positif, dan mengurangi kematian dan kehancuran yang masif.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan akan memungkinkan mereka untuk memahami masalah dan akan memungkinkan mereka untuk memahami masalah dan kapasitasnya. Masyarakat setempat juga dapat dengan mudah memahami realitas dan konteks yang lebih baik daripada orang luar.

4. Keberlanjutan Kerjasama *Stakeholder*

Ada banyak alasan untuk penurunan berharap keterlibatan masyarakat dalam suatu proyek tertentu. Unsur yang paling umum adalah kurangnya kemitraan, partisipasi, pemberdayaan dan kepemilikan masyarakat lokal. Semua proyek harus mengundang partisipasi stakeholder untuk memiliki keberlanjutan. Stakeholder program manajemen bencana berbasis komunitas dapat didefinisikan secara luas sebagai individu atau institusi, yang mungkin telah member kontribusi pada manajemen bencana atau mereka yang biasanya terkena dampak bencana di suatu area, dan dengan demikian memiliki minat dalam manajemen bencana berbasis komunitas. Keterkaitan antara pemerintah, LSM, lembaga akademis dan organisasi internasional harus tercermin dalam hal inisiatif proyek, dan model kerjasama harus dibuat.

Manajemen bencana berbasis komunitas diharapkan akan berhasil meningkatkan kesediaan individu untuk bekerja mencapai tujuan yang sama. Manajemen bencana yang efektif dan berkelanjutan mensyaratkan dukungan dan partisipasi dari berbagai stakeholder, baik pemerintah maupun komunitas lokal. Masyarakat merupakan pihak yang terkena dampak langsung, dari terjadinya suatu bencana, dan pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan pada warganya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menekankan pada menganalisis dan menjelaskan secara rinci, jelas, dan cermat tentang objek yang diteliti dan kondisinya. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara tepat terhadap sesuatu yang tengah terjadi dan sedang berlangsung pada penelitian. Nazir (2005:54) mendefinisikan metode penelitian deskriptif sebagai:

“Suatu metode dalam meneliti kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi sistem, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat antar fenomena yang diselidiki”.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2008:15). Penggunaan metode deskriptif merupakan upaya untuk menggambarkan apa yang terjadi terhadap penelitian yang diangkat.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk mempermudah dalam membuat keputusan mengenai data yang diperlukan dalam penulisan ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya fokus penelitian akan mempermudah peneliti dalam mengambil data. Selain hal tersebut agar peneliti lebih terarah dalam menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Adapun yang menjadi fokus dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Penyelenggaraan manajemen bencana dalam membangun masyarakat tangguh bencana
 - a. Regulasi tentang manajemen bencana dalam membangun masyarakat tangguh bencana
 - b. Tahapan manajemen bencana dalam membangun masyarakat tangguh bencana
 - 1) Membangun kapasitas dalam meningkatkan sumber daya aparatur BPBD Kabupaten Malang
 - 2) Upaya sosialisasi kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
 - 3) Upaya pelebagaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

- 4) Pelibatan aktor dalam kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam membangun masyarakat tangguh bencana di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
 - a. Faktor pendukung
 - 1) Sumber Pendanaan yang Memadai
 - 2) Adanya Dukungan dari Lembaga Internasional
 - 3) Peran Aktif Sektor Swasta
 - 4) Peran Aktif Masyarakat
 - b. Faktor penghambat
 - 1) Jaringan Komunikasi yang Sulit
 - 2) Masih Rendahnya Tingkat Kedisiplinan Masyarakat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana peneliti melakukan penelitian untuk mengungkap keadaan sebenarnya dari objek penelitian dan memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan penelitian ini, peneliti akan memperoleh data dan informasi sesuai tema, masalah, dan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, hal ini dikarenakan Desa

Ngadas memiliki tingkat ancaman bencana yang cukup tinggi, terutama pada saat musim penghujan karena berpotensi terjadi bencana tanah longsor.

Selain lokasi penelitian terdapat situs penelitian, dimana situs penelitian merupakan tempat yang di dalamnya peneliti dapat mengamati keadaan sebenarnya dari objek penelitian, sehingga peneliti mendapatkan data dan informasi yang valid dan relevan guna menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Dengan demikian situs dalam penelitian ini adalah :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang
2. Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

D. Sumber Data

Sumber data pada hakekatnya merupakan kumpulan dari sumber-sumber informasi dan data yang diperoleh peneliti saat melaksanakan penelitian. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana saja data dapat diperoleh (Arikunto, 2000: 107). Sumber data yang diperoleh penulis, yakni:

1. Informan

Informan merupakan sasaran objek peneliti yang akan menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data-data primer melalui proses observasi dan wawancara lapangan. Target peneliti yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah betul-betul warga yang terlibat langsung dalam kejadian bencana. Dalam hal ini yang

dimaksud data informan yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang
- b. Pihak Kepala Desa atau Perangkat Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
- c. Pihak masyarakat Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
- d. Pihak lembaga sosial yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

2. Observasi

Observasi peristiwa sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu (Cartwright dan Cartwright dalam Herdiansyah, 2010:131). Sedangkan menurut Herdiansyah (2010:131), inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Observasi dilakukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.

3. Dokumen

Data yang sumbernya diluar kata dan tindakan yang merupakan sumber pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen dokumen. Dilihat dari sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dan arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2007:159). Dalam penelitian ini data sekundernya adalah:

- a. Dokumen-dokumen atau arsip BPBD Kabupaten Malang
- b. Peraturan Perundang-undangan

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang relevan, tepat dan akurat dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Teknik wawancara ini berguna untuk mendapatkan data dari orang pertama (primer), pelengkap teknik pengumpulan lainnya, menguji hasil pengumpulan data lainnya. Dalam tahap ini peneliti berhadapan langsung dengan narasumber untuk mengadakan tanya jawab secara lebih lanjut dan memperjelas data dan informasi yang sesuai dengan bantuan wawancara (Usman dan Akbar, 2009:52). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak dari Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dan Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

2. Observasi

Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu (Cartwright dan Cartwright dalam Herdiansyah, 2010:131). Sedangkan menurut Herdiansyah (2010:131), inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Observasi dilakukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2010:143). Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan dokumen yang di dapat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang terkait dengan penanggulangan bencana berbasis masyarakat,

selanjutnya dokumen tersebut dipelajari dan apabila memiliki hubungan dengan hal yang sedang diteliti, maka dokumen tersebut dimasukkan ke dalam hasil penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri ataupun dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang utama (Zuriah, 2009:168). Berikut ini adalah instrumen penelitiannya:

1. Instrumen untuk wawancara adalah peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan panca indera untuk melihat, mengamati, dan merasakan kejadian-kejadian yang ada di lapangan terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian. Serta terjun langsung untuk memperoleh data langsung dari narasumber dengan bantuan wawancara (*interview guide*). Tujuannya agar wawancara yang dilakukan sesuai dengan topik yang telah ditetapkan.

2. Instrumen dalam observasi adalah catatan lapangan, yaitu catatan sistematis yang dibuat peneliti sewaktu mengadakan pengamatan wawancara atau menyaksikan suatu kejadian tertentu pada saat penelitian dilaksanakan. Tujuannya agar peneliti terhindar dari kesalahan akan hal yang diamati.
3. Instrumen yang digunakan dalam dokumentasi adalah penulis sendiri dengan mempergunakan alat tulis, fotocopy, dan peralatan lain yang dapat digunakan untuk hal tersebut.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan yang mengatur, mengelompokkan, mengurutkan, serta mengkategorikan, sehingga temuan berdasarkan pada fokus dan permasalahan yang perlu dijawab. Analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam melakukan penelitian, karena dari analisis ini akan diperoleh temuan-temuan, baik temuan yang substantif maupun temuan formal. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2007:103), analisis data merupakan proses pengorganisasian serta mengurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat menemukan tema dan menemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data-data yang sudah terkumpul dan dikategorikan sesuai dengan kategori-kategori yang ada digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan

analisis data model interaktif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, dengan berdasarkan model interaktif (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014:14).

Pada analisis data Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14) terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion: drawing/verifying*). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakkan, dan atau transformasi data yang muncul dari catatan yang ditulis di lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan-bahan empiris lainnya. Dengan kondensasi data, kita membuat data yang semakin kuat. Sebagai proses pengumpulan data, episode selanjutnya adalah kondensasi data yang terdiri dari menulis ringkasan, mengkode, pengembangan tema, pengkategorian, dan menulis analisis. Kondensasi data/proses transformasi berlanjut terus sampai penelitian di lapangan berakhir, sampai penulisan laporan. Kondensasi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan

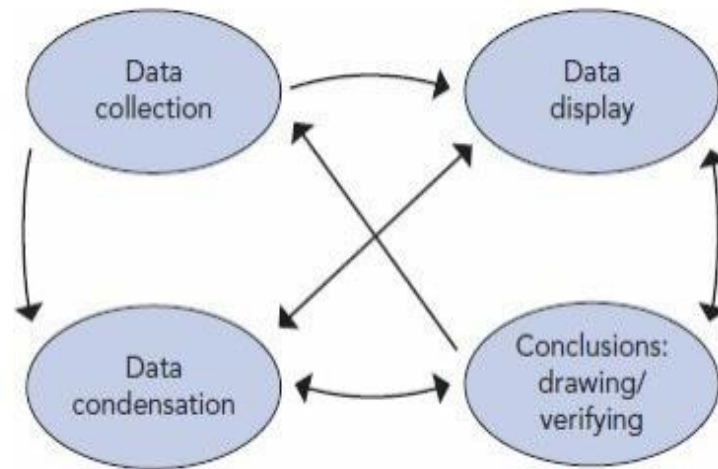
mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penyajian merupakan langkah yang terorganisasi, meringkas penemuan informasi yang memungkinkan adanya penggambaran kesimpulan dan tindakan yang seharusnya dilakukan. Dalam program kerja, kami menjadi yakin bahwa dalam penyajian data yang baik merupakan cara utama untuk menguatkan analisis kualitatif. Dalam buku ini penyajian data mendiskusikan dan menggambarkan banyak jenis matriks, grafik, diagram, dan jaringan. Semua dirancang untuk merakit informasi secara terorganisir untuk dapat diakses, bentuk yang padu menjadikan analisis dapat dilihat apa yang sedang terjadi dan menggambarkan kesimpulan atau berlanjut ke langkah selanjutnya.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion: Drawing/Verifying*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Mulai dari pengumpulan data, mengartikan/menafsirkan analisis kualitatif dengan melakukan pencatatan pola, menjelaskan aliran/arus, dan tujuan dari penelitian. Sehingga peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan. Makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.



Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14)

Berdasarkan gambar diatas, maka langkah awal yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data, jika data dirasa telah siap untuk disajikan maka dapat langsung melangkah ke tahapan selanjutya yaitu penyajian data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Malang

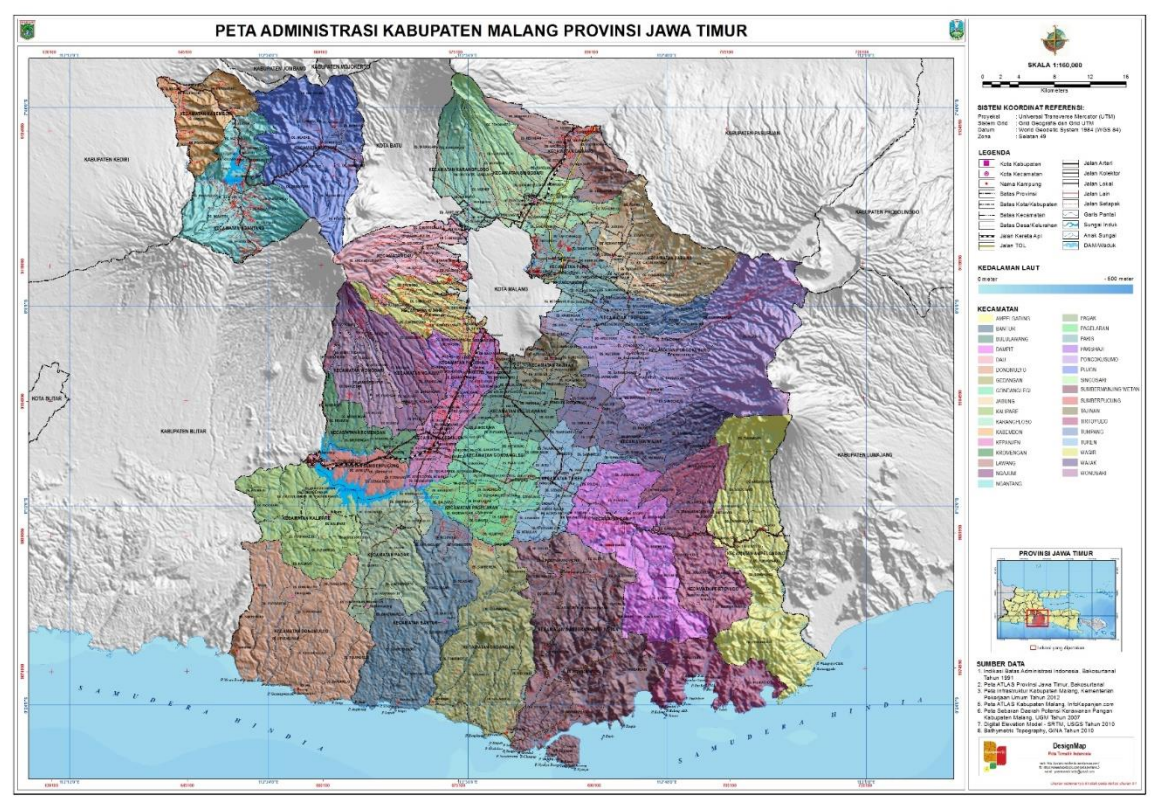
Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Kabupaten Malang terletak pada $112^{\circ} 17' 10,90''$ sampai $112^{\circ} 57' 00''$ Bujur Timur $^{\circ} 44' 55,11''$ sampai $8^{\circ} 26' 35,45''$ Lintang Selatan. Luas wilayah 3.3348 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri, dan bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.

2. Wilayah Administratif Kabupaten Malang

Secara Administratif Kabupaten Malang terdiri dari 33 Desa/Kecamatan yaitu Kecamatan Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Sumber Pucung, Sumbermanjing, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak dan Wonosari.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar

pantainya berbukit. Kondisi lahan di Kabupaten Malang bagian utara relatif subur. Masyarakat Kabupaten Malang umumnya bertani, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan, sebagian lainnya telah berkembang sebagai masyarakat industri hidrologi, Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk.



Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur
 Sumber : Draft Pengurangan Risiko Bencana BPBD Kabupaten Malang

3. Demografi Kabupaten Malang

Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Malang berjumlah 2.447.051 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.232.841 jiwa (50,38 persen) dan perempuan 1.214.210 jiwa (49,62 persen) berdasarkan komposisi umurnya,

penduduk Kabupaten Malang termasuk penduduk Intermediete. Komposisi umur anak (0-14 tahun) sekitar 24,38 persen (dibawah 40 persen) dan umur tua (65 tahun keatas) sekitar 9,72 persen (dibawah 10 persen), sedangkan jika dilihat menurut umur median (umur yang membagi penduduk dengan dua bagian dengan jumlah yang sama), maka penduduk Kabupaten Malang tergolong tua dengan umur median pada kelompok 30-34 tahun. Umur median intermediate berada pada kisaran 20-30 dan umur median muda adalah 20 tahun kebawah. Dengan komposisi umur produktif (15-64 tahun) sekitar 65,90 persen, maka sumberdaya manusia Kabupaten Malang cukup potensial dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurut data registrasi penduduk, diantara 33 kecamatan di Kabupaten Malang diketahui bahwa kecamatan singosari memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu sebesar 155.026 jiwa dengan komposisi laki-laki 77.030 dan perempuan 77.996 jiwa. Kecamatan yang memiliki penduduk terkecil adalah Kecamatan Kasembon dengan jumlah penduduk 31.498 jiwa dan perempuan 15.679 jiwa.

Kepadatan penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2010 mencapai 822 jiwa/km². Beberapa kecamatan yang memiliki kepadatan tinggi diatas 2000 jiwa/km² adalah kecamatan kepanjen dan pakis, sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan 1500-1999 jiwa/km² adalah Kecamatan Turen, Sumberpucung dan Pakisaji.

Selebihnya memiliki kepadatan di bawah 1500 jiwa/km². Secara keseluruhan penyebaran penduduk kabupaten malang memiliki ketimpangan rendah dengan nilai Indeks Gini sekitar 0,1190. Kabupaten Malang merupakan

kabupaten yang tergolong memiliki aktifitas ekonomi yang cukup tinggi, hal ini terlihat dari besarnya jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Kabupaten Malang yang dalam 5 tahun terakhir selalu masuk 5 besar di Provinsi Jawa Timur.

4. Pemerintah Kabupaten Malang

Pemerintah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 dengan pusat pemerintahan berada di Kota Malang, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2008 maka Ibukota kabupaten Malang dipindah dari wilayah Kota Malang ke wilayah kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Adapun tujuan umum pembentukan Kabupaten Malang selaras dengan semangat dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan warisan leluhur pendahulu yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur material spiritual diatas dasar kesucian yang langgeng (abadi) dan dikenal dengan sesanti *Satata Gama Karta Raharja*. Adapun lambang dari Kabupaten Malang sebagai berikut:



Gambar 4. Lambang Kabupaten Malang

Sumber : Website Kemendagri, 2016

Adapun arti lambang dari Kabupaten Malang di atas, antara lain :

1. Bentuk Perisai Segi Lima dengan garis tepi tebal berwarna merah putih menggambarkan jiwa Nasional Bangsa Indonesia yang suci dan berani, dimana segala usaha ditujukan untuk kepentingan Nasional berlandaskan Falsafah Pancasila.
2. Kubah dengan garis tepi atapnya berwarna kuning emas dan warna dasar hijau mencerminkan papan atau tempat bernaung bagi kehidupan rohani dan jasmani di ruang lingkup Daerah Kabupaten Malang yang subur makmur.

3. Bintang bersudut lima berwarna kuning emas, mencerminkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Falsafah Pancasila yang Luhur dan Agung.
4. Untaian padi berwarna kuning emas, dan daun kapas berwarna hijau serta Bunga Kapas berwarna putih mencerminkan tujuan masyarakat adil dan makmur.
5. Daun kapas berjumlah 17 (tujuh belas), Bunga Kapas jumlah 8 (delapan), Gelombang laut berjumlah 45 (empat puluh lima) mencerminkan semangat perjuangan Proklamasi 17 Agustus 1945.
6. Rantai berwarna kuning emas mencerminkan persatuan dan keadilan, gunung berapi berwarna hijau mencerminkan potensi alam daerah Kabupaten Malang, sedangkan asap berwarna putih mencerminkan semangat yang tak pernah kunjung padam.
7. Laut mencerminkan kekayaan alam yang berada di Kabupaten Malang. Sedangkan warna biru tua mencerminkan cita-cita yang abadi dan tak pernah padam.
8. Keris berwarna hitam dan putih mencerminkan jiwa kepahlawanan dan kemegahan sejarah daerah Kabupaten Malang.
9. Buku terbuka berwarna putih mencerminkan tujuan meningkatkan kecerdasan rakyat untuk kemajuan.
10. Sesanti Satata Gama Karta Raharja mencerminkan masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil disertai dasar kesucian yang langgeng (abadi).

Melihat lambang Kabupaten Malang di atas yang menjadi dasar pemerintahan dari dahulu hingga sekarang maka Peraturan daerah Kabupaten Malang Nomor 2

Tahun 2011 menetapkan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2010-2015 menetapkan Kabupaten Malang memiliki visi, yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MALANG YANG MANDIRI, AGAMIS, DEMOKRATIS, PRODUKTIF, MAJU, AMAN, TERTIB dan BERDAYA SAING atau MADEP MANTEB”

Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib, dan berdaya saing artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu masyarakat sejahtera. Dalam rangka pencapaian sebuah visi, pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana diatas, mempunyai sebuah misi untuk mencapai visi yang diinginkan, adapun misi pembangunan Kabupaten Malang tahun 2010-2015 antara lain :

1. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya.
2. Mewujudkan pemerintahan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis.
3. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM.
4. Mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan damai.
5. Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
6. Mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing.

B. Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Sejarah BPBD

Indonesia merupakan negara yang memiliki gugusan kepulauan yang terbesar di dunia. Wilayah yang terletak diantara 2 benua Asia dan Australia dan Lautan Hindia dan Pasifik ini memiliki 17.508 pulau, maka perlu disadari bahwa wilayah Nusantara ini memiliki 129 gunung api aktif, atau dikenal dengan sebutan *ring of fire*, serta terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia. Lempeng Indo Australia, Eurasia, dan Pasifik.

Berada di pertemuan tiga lempeng tektonik tersebut menempatkan Indonesia berpotensi terhadap ancaman bencana alam. Di sisi lain, posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis serta kondisi hidrologis memicu terjadinya bencana alam lainnya, seperti angin puting beliung, hujan ekstrim, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Tidak hanya bencana alam sebagai ancaman, tetapi bencana non alam sering melanda Indonesia, seperti kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, maupun kegagalan teknologi.

Menghadapi berbagai ancaman bencana tersebut, pemerintah Indonesia berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana di tanah air. Pembentukan lembaga merupakan salah satu bagian dari sistem yang telah berproses dari waktu ke waktu. Lembaga ini telah hadir sejak kemerdekaan dideklarasikan pada tahun 1945 dan perkembangan lembaga penyelenggara penanggulangan bencana dapat terbagi berdasarkan periode waktu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdiri dengan diawali berdirinya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai induk dari BPBD. Adapun sejarah terbentuknya BPBD dapat dilihat dalam penelusuran awal terbentuknya BNPB sebagai berikut:

a. 1945 - 1966

Pemerintah Indonesia membentuk Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Badan yang didirikan pada 20 Agustus 1945 ini berfokus pada kondisi situasi perang pasca kemerdekaan Indonesia. Badan ini bertugas untuk menolong para korban perang dan keluarga korban semasa perang kemerdekaan.

b. 1966 - 1967

Pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) melalui Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966. Penanggung jawab untuk lembaga ini adalah menteri sosial. Aktivitas BP2BAP berperan pada penanggulangan tanggap darurat dan bantuan korban bencana. Melalui keputusan ini, paradigma penanggulangan bencana berkembang tidak hanya berfokus pada bencana yang disebabkan manusia tetapi juga bencana alam.

c. 1967 - 1979

Frekuensi kejadian bencana alam terus meningkat. Penanganan bencana secara serius dan terkoordinasi sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pada tahun 1967 Presidium Kabinet mengeluarkan Keputusan Nomor 14/U/KEP/I/1967 yang bertujuan untuk membentuk Tim koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA).

d. 1979 – 1990

Pada periode ini Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA) ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Nasional penanggulangan Bencana Alam (Bakornas PBA) yang diketuai oleh Menkokesra dan dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1979. Aktivitas manajemen bencana mencakup pada tahap pencegahan, penanganan darurat, dan rehabilitasi. Sebagai penjabaran operasional dari Keputusan Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri dengan instruksi Nomor 27 tahun 1979 membentuk satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (Satkorlak PBA) untuk setiap provinsi.

e. 1990 – 2000

Bencana tidak hanya disebabkan karena alam tetapi juga non alam serta sosial, hal tersebut melatarbelakangi penyempurnaan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990, lingkup tugas dari Bakornas PB diperluas tidak hanya berfokus pada bencana alam tetapi juga non alam dan sosial.

f. 2001 – 2005

Indonesia mengalami krisis multidimensi sebelum periode ini. Bencana sosial yang terjadi di beberapa tempat kemudian memunculkan permasalahan baru. Permasalahan tersebut membutuhkan penanganan khusus karena terkait dengan pengungsian. Bakornas PB kemudian dikembangkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001.

g. 2005 – 2008

Tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya pada tahun 2004 telah mendorong perhatian serius Pemerintah Indonesia dan dunia internasional dalam manajemen penanggulangan bencana. Menindaklanjuti situasi saat itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB). Badan ini memiliki fungsi koordinasi yang didukung oleh pelaksana harian sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana. Sejalan dengan itu, pendekatan paradigma pengurangan resiko bencana menjadi perhatian utama.

h. 2008

Dalam merespon sistem penanggulangan bencana saat itu, Pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi, lembaga, maupun *budgetting*. Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Untuk kabupaten/kota yang memiliki kerawanan bencana yang cukup tinggi, kehadiran BPBD adalah suatu keharusan. Dengan adanya BPBD, korban harta dan jiwa diharapkan berkurang apabila suatu bencana datang. Selain itu, Mendagri dan BNPB diharapkan dapat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para kepala daerah yang terbukti sigap dan tanggap dalam menanggulangi bencana. Apresiasi dan penghargaan itu sangat diperlukan untuk memotivasi kepala-kepala daerah yang lain agar berbuat yang sama. Selain itu penghargaan juga dimaksudkan untuk mesosialisasikan betapa pentingnya kesiap-siagaan dalam menghadapi bencana. Untuk menghadapi bencana BNPB tidak dapat bergerak sendiri, BNPB memerlukan kepala daerah, dunia usaha, dan bantuan langsung dari masyarakat.

Kabupaten Malang memiliki luasan wilayah 3.238,26 km², Kabupaten Malang merupakan Kabupaten terluas kedua dari 38 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Terdapat 9 gunung api aktif maupun non aktif menyebar merata. Kondisi topografi juga menunjukkan potensi hutan yang besar dan menghasilkan sumber air yang mengalir melalui 18 sungai. Dengan memperhatikan kondisi wilayah tersebut, maka dibentuklah BPBD Kabupaten Malang melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana.

2. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Adapun visi dan misi yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, yaitu :

1. Visi

“Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Malang dalam Menghadapi Bencana”

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang harus mampu untuk mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan bencana serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan kesiap-siagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka implementasinya dijabarkan melalui misi dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya akan dituangkan pada rumusan program dan kegiatan nantinya. Sebagai arah tindak organisasi, maka perumusan misi dilakukan dengan tetap mengacu dan mempertimbangkan tugas dan pokok fungsi organisasi.

Adapun misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang adalah :

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.

3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Upaya pencapaian misi tersebut diperlukan adanya suatu kerjasama yang sinergis antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan arah kegiatan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

3. Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selain visi dan misi yang dijadikan pedoman oleh BPBD Kabupaten Malang dalam rangka pengurangan resiko bencana, BPBD Kabupaten Malang juga memiliki tujuan dan sasaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai sebuah organisasi penanggulangan bencana daerah. Tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

1. Tujuan

- a. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana.
- b. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- c. Mewujudkan kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat kecamatan dan desa.

- d. Mewujudkan sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi, penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan.
- e. Meningkatkan tertib administrasi perkantoran.

2. Sasaran

- a. Penguatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi resiko bencana serta penanganan bencana.
- b. Pembentukan Tim Gerak Cepat (Unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai.
- c. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana.
- d. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
- e. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Malang

Berdasarkan visi dan misi yang dipaparkan sebelumnya, BPBD Kabupaten Malang memiliki tugas dan fungsi guna merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan, tugas dan fungsi tersebut diantaranya :

1. Tugas Pokok

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- b. Menetapkan standarisasi serta penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- g. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

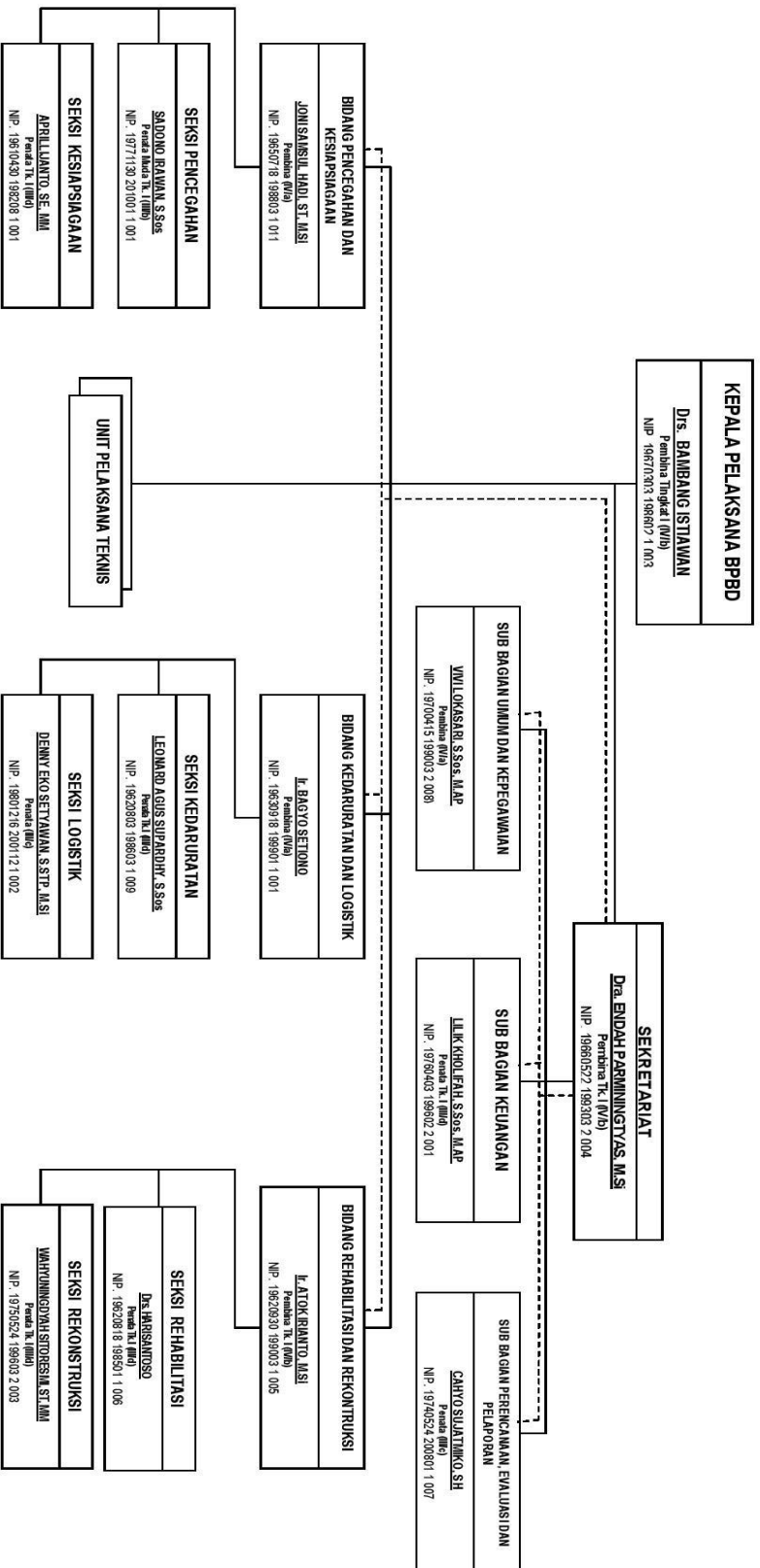
2. Fungsi Utama BPBD Kabupaten Malang

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan peanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

5 . Struktur Organisasi

Struktur organisasi sangat dibutuhkan pada sebuah organisasi, dimana struktur organisasi dibentuk sebagai kerangka kerja formal sebuah organisasi. Dengan kerangka kerja tersebut dapat memudahkan dalam pembagian pekerjaan sesuai dengan bidangnya, serta dapat dikoordinasikan dengan mudah.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG**



..... : Garis Komando
..... : Garis Koordinasi

Gambar 5. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Malang

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang

C. Gambaran Umum Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

1. Kondisi Geografis Desa Ngadas

Desa Ngadas yang memiliki luas 395 Ha terbagi menjadi 2 Dusun yaitu Dusun Jarak Ijo dan Dusun Ngadas itu sendiri. Desa Ngadas memiliki keterbatasan dalam sarana angkutan umum dan sarana pelengkap jalan, selain itu jalan penghubung antar dusun masih ada yang kondisinya rusak sehingga menyebabkan tingkat aksesibilitas di Desa Ngadas kurang memadai, jarak tempuh pusat desa ke hierarki yang lebih tinggi adalah sebagai berikut :

1. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 24 Km
2. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 60 Km
3. Jarak dari Ibukota Provinsi : 160 Km



Gambar 6. Peta Administrasi Desa Ngadas

Sumber : Balai Desa Ngadas, 2017

2. Kondisi Topografi Desa Ngadas

Desa Ngadas merupakan desa yang terletak pada ketinggian 2.150 – 2.200 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan lahan 15° - 60° . Letak Desa Ngadas sendiri berada di lereng Gunung Bromo yang mayoritas kondisi datarannya dekat lereng yang curam, serta banyak dijumpai tanjakan dan turunan.

3. Kondisi Iklim Desa Ngadas

Desa Ngadas yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Poncokusumo yang terletak dibagian timur Kabupaten Malang tepatnya 30

km dari Kota Malang dan 24 km dari kecamatan Poncokusumo dengan ketinggian 2.200 meter diatas permukaan laut serta memiliki suhu rata-rata 18° c dengan curah hujan rata-rata antara 2.300 mm - 2.500 per tahun.

4. Kondisi Hidrologi Desa Ngadas

Kebutuhan air di Desa Ngadas berasal dari PDAM, air hujan, sungai dan sumber mata air yang berada di Desa Ngadas dan sekitarnya yang dialirkan ke dusun-dusun dengan menggunakan pipa (pipanisasi). Air sungai dan air hujan digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti kebutuhan air minum, memasak, mencuci dan mandi. Desa Ngadas sendiri memiliki sumber mata air dari pegunungan sekitar yang dialirkan ke seluruh dusun Jarak Ijo dan Dusun Ngadas itu sendiri.

5. Kondisi Ekonomi

Mayoritas masyarakat Desa Ngadas bermata pencaharian sebagai petani. Mereka hidup dari bercocok tanam di kebun, ladang dan lahan pertanian yang terdapat di lereng pegunungan Bromo-Semeru. Selain bercocok tanam, Desa Ngadas berupaya mamaksimalkan potensi yang ada seperti menyediakan jasa angkutan dan usaha bisnis yang lainnya seperti penginapan mengingat Desa Ngadas telah ditetapkan sebagai desa wisata dengan kondisi alamnya yang indah dan salah satu akses menuju Gunung Bromo dan Semeru. Selain itu juga Pemerintah Desa selalu mendorong dan

memotivasi masyarakat untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang produktif yang bisa menopang kebutuhan ekonomi rumah tangganya.

6. Kondisi Bencana Desa Ngadas

Berdasarkan hasil dari *Forum Group Discussion* (FGD) dengan masyarakat dan perangkat Desa Ngadas, telah berhasil teridentifikasi berbagai potensi ancaman bencana yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2. Potensi Ancaman Bencana Desa Ngadas

No	Jenis Bencana	Potensi
1	Letusan Gunung Api	√
2	Tanah Longsor	√
3	Banjir Lahar Hujan	√
4	Gagal Teknologi	√
5	Gempa Bumi	√
6	Cuaca Ekstrim	√
7	Kekeringan	√
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	√
9	Kebakaran Pemukiman	√
10	Epidemi dan Wabah Penyakit	√
11	Konflik Sosial	√

(Sumber Laporan Akhir Fasilitasi Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana Desa Ngadas)

Dari 11 ancaman tersebut, telah disepakati terdapat 4 ancaman yang diperkirakan sangat berpotensi akan terjadi dan dapat menimbulkan dampak yang paling luas yaitu erupsi gunung api, banjir lahar dingin, longsor dan kebakaran hutan.

D. Data Fokus Penelitian

1. Penyelenggaraan Manajemen Bencana dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana

a. Regulasi tentang Manajemen Bencana dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana

Berbagai macam bencana silih berganti melanda Indonesia, dimana bencana secara umum disebabkan karena adanya interaksi antara ancaman dengan kerentanan. Karakteristik sebuah bencana perlu diidentifikasi dan dipahami aparaturnya pemerintah dan masyarakat. Upaya mengenal karakteristik sebuah bencana yang sering sering dilakukan merupakan suatu upaya “mitigasi” sehingga diharapkan apabila terjadi bencana berbagai macam jenis dampak dan kerugian dapat dikurangi.

Penyebab timbulnya sebuah bencana yang banyak menimbulkan korban jiwa dikarenakan masyarakat tidak bisa memahami karakteristik ancaman bencana tersebut. Kebanyakan masyarakat masih menganggap bencana sebagai suatu kejadian yang sepele, akibatnya jika terjadi bencana secara tiba-tiba, menyebabkan banyaknya korban jiwa dan kerusakan atau kerugian yang cukup besar. Padahal

sebagian jenis bencana dapat diprediksi waktu kejadiannya dan dapat dicegah sedini mungkin.

Kabupaten Malang merupakan Kabupaten yang memiliki tingkat ancaman bencana alam yang cukup tinggi, hal ini dikarenakan kondisi alam Kabupaten Malang yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan. Sejauh ini berbagai macam jenis kejadian bencana melanda Kabupaten Malang, terutama bencana longsor yang sangat berpotensi menjadi ancaman besar bagi masyarakat Kabupaten Malang.

Salah satu bentuk peran pemerintah untuk menanggulangi bencana adalah dengan cara membangun masyarakat tangguh bencana. Berdasarkan peraturan kepala BNPB No 1 tahun 2012 menyebutkan bahwa pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Salah satu peran pemerintah untuk membentuk masyarakat yang tangguh bencana adalah melalui kebijakan pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No 1 tahun 2012

Mengacu pada Peraturan Kepala BNPB No 1 tahun 2012, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang memiliki tugas merumuskan kebijakan terkait penanggulangan bencana. Kebijakan penanggulangan bencana merupakan kebijakan yang memuat program-program pra-bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana. Proses perumusan

kebijakan penanggulangan bencana tersebut dirumuskan dalam sebuah forum yang melibatkan seluruh *stakeholder* di dalamnya. Hasil dari kebijakan tersebut, dirangkum pada dokumen Rencana Penanggulangan bencana (RPB).

Salah satu bentuk peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang yaitu menjadikan masyarakat tangguh bencana, yang berarti masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir dampak dari sebuah bencana. Masyarakat tangguh bencana merupakan masyarakat yang mampu mengelola dan menjaga struktur dasar dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Dan ketika terkena dampak bencana, masyarakat akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali atau memlihkan diri secara mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yohan selaku staff Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, menjelaskan bahwa BPBD sebagai regulator dalam membangun masyarakat tangguh bencana yaitu :

“BPBD Kabupaten Malang sebagai regulator yang pertama adalah membuat peraturan yang terkait dengan desa tangguh bencana, mengajukan program kegiatan desa tangguh bencana. Selanjutnya setiap aktor yang terlibat dalam kegiatan desa tangguh bencana tersebut diberikan Surat Keputusan (SK) baik SK Kepala Pelaksana, maupun SK Bupati. Jika lingkupnya lebih luas, yang memberikan SK tersebut adalah Bupati. Selain itu BPBD juga memiliki peran sebagai pembuat rumusan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah, pembuatan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Kepala (PERKA) Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) No 1 tahun 2012, selanjutnya diadopsi sesuai dengan kebutuhan pemerintah Kabupaten Malang, lalu dirumuskan bersama dinas teknis yang lain, lalu diajukan kepada Badan Hukum terkait kebijakan yang akan dibuat”. (Wawancara pada tanggal 6 November 2017 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Malang membuat sebuah peraturan berdasarkan Peraturan Kepala (PERKA) Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) No 1 tahun 2012 terkait dengan desa tangguh bencana, mengajukan program kegiatan desa tangguh bencana, dan setiap aktor yang terlibat dalam kegiatan desa tangguh bencana diberikan Surat Keputusan (SK), baik SK Kepala Pelaksana, maupun SK Bupati. Jika lingkupnya lebih luas, maka yang memberikan SK tersebut adalah Bupati.

Selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang membuat rumusan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah, dimana kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Kepala (PERKA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kebijakan yang akan dibuat nantinya akan dirumuskan bersama dinas teknis di Kabupaten Malang, jika sudah selesai diajukan kepada Badan Hukum terkait dengan kebijakan yang telah dibuat.

Selain itu, Bapak Joni selaku Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, menjelaskan bahwa BPBD sebagai regulator dalam membangun masyarakat tangguh bencana yaitu :

“BPBD Kabupaten Malang pada kegiatan desa tangguh bencana, bisa berperan sebagai pembentuk, pembina, pengendali, dan juga pengarah agar kegiatan desa tangguh bencana tersebut dapat berjalan lancar. Sebagai pembuatan kebijakan, BPBD Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang terkait penanggulangan bencana, dan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kebijakan penanggulangan bencana meliputi kebijakan administratif dan kebijakan teknis, jika kebijakan administratif berupa sebuah team atau lembaga, maka diberikan Surat Keputusan (SK) oleh Kepala Desa, dan secara teknis dapat melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berupa pelatihan, mitigasi struktural dan non struktural”. (wawancara pada tanggal 6

November 2017 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Pada wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis kebijakan penanggulangan bencana terdapat dua jenis kebijakan, yaitu kebijakan teknis dan kebijakan administratif. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang juga memiliki peran sebagai pembentuk, pembina, pengendali, dan juga pengarah pada kegiatan desa tangguh bencana. Pada proses pembuatan kebijakan, BPBD Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang terkait penanggulangan bencana, dan mengacu pada Peraturan Kepala (PERKA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

b. Tahapan Manajemen Bencana dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana

1) Membangun Kapasitas dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Aparatur BPBD Kabupaten Malang

Pembangunan kapasitas merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang ada di dalam sebuah organisasi. Bentuk pembangunan kapasitas sumberdaya manusia di dalam organisasi yaitu dengan cara melaksanakan berbagai pelatihan-pelatihan dan pengembangan guna meningkatkan kemampuan sumber daya yang ada.

Berbagai macam bentuk pembangunan kapasitas dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh instansi swasta yang berguna untuk meningkatkan kinerja para pegawainya, serta pembangunan kapasitas berguna untuk

meningkatkan keahlian para pegawainya. BPBD Kabupaten Malang merupakan sebuah SKPD yang dimana para pegawainya dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian di bidang penanggulangan bencana, diperlukan keahlian yang harus dimiliki oleh setiap sumber daya yang ada.

BPBD Kabupaten Malang selaku SKPD di bidang penanggulangan bencana, sangat sering sekali melaksanakan pelatihan-pelatihan tentang kebencanaan, berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Sadono selaku Kasi Pencegahan menjelaskan tentang bentuk pelatihan-pelatihan yang sering diikuti oleh para personil BPBD guna meningkatkan kemampuan para personil BPBD yaitu :

“Para personil BPBD Kabupaten Malang sering melaksanakan berbagai macam pelatihan-pelatihan tentang kebencanaan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumberdaya BPBD Kabupaten Malang sangatlah penting, dikarenakan pada saat proses penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana dan pasca bencana sangat memerlukan keahlian di dalamnya. Dalam waktu dekat ini BPBD Kabupaten Malang akan melaksanakan pelatihan tentang pengoperasian alat-alat berat, dan yang memberikan pelatihan tersebut adalah perusahaan yang memproduksi alat-alat berat tersebut. Akan tetapi pada pelatihan-pelatihan tersebut BPBD Kabupaten Malang sedikit mengalami permasalahan pada pendanaan, dan pemberian uang saku bagi para personil yang akan melaksanakan pelatihan di luar kota”. (Wawancara Pada 6 November 2017 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan kapasitas dalam rangka meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia BPBD Kabupaten Malang sudah dilakukan secara maksimal, akan tetapi masih ada kendala pada pendanaan untuk pemberian uang saku bagi para personil BPBD Kabupaten Malang yang akan melaksanakan pelatihan di luar kota. Akan

tetapi meskipun ada hambatan pendanaan, pihak BPBD Kabupaten Malang tetap melaksanakan berbagai pelatihan yang diselenggarakan baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Pusat.

Meskipun terdapat sedikit hambatan berupa pendanaan, akan tetapi setiap pelatihan-pelatihan tetap dijalankan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bhekti selaku staff darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menjelaskan pengalaman dan jenis kegiatan pelatihan apa saja yang pernah diikuti, yaitu

“Berbagai pelatihan yang pernah didapat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yaitu pelatihan Satuan Reaksi Cepat (SRC) untuk tingkat pusat, kegiatan pelatihan bersama Palang Merah Indonesia (PMI), dan latihan gabungan terkait penanggulangan bencana bersama BPBD Kota Batu. Dalam pelatihan tersebut ada sedikit hambatan berupa permasalahan teknis, yaitu kondisi cuaca yang kurang mendukung untuk melaksanakan pelatihan. Akan tetapi pelatihan ini sangat memberikan banyak manfaat yang dirasakan. Selain mendapat ilmu dan teknik penanggulangan bencana yang baru, manfaat lain yang didapat adalah lebih mengenal teknis di lapangan”. (Wawancara Pada 6 November 2017 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan-pelatihan terkait pembangunan kapasitas sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang telah dilaksanakan dengan baik, meskipun ada beberapa kendala teknis yang terkadang menjadi faktor penghambat berjalannya pelatihan. Akan tetapi pelatihan-pelatihan yang didapat sangat memberikan manfaat yang baik, selain mendapat ilmu dan teknik penanggulangan bencana yang baru, personil BPBD Kabupaten Malang lebih paham terkait teknis dilapangan untuk kegiatan penanggulangan bencana.

Pengalaman terkait pelatihan-pelatihan penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang juga disampaikan oleh Bapak Yohan selaku staff Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Malang, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

“Berbagai pelatihan yang didapatkan terkait pembangunan kapasitas baik di tingkat pusat, di tingkat daerah maupun dengan lembaga internasional diantaranya adalah pelatihan manajemen bencana yang diadakan oleh Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, pelatihan pemetaan erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Sumatera Utara bersama *United Nations Development Programme* (UNDP), dan pelatihan fasilitator desa tangguh bencana. Berbagai pelatihan-pelatihan tersebut sangat bermanfaat untuk pekerjaan sehari-hari, akan tetapi ada juga hambatan yang didapat yaitu berupa keterbatasan personil BPBD yang hanya berjumlah sedikit terutama di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Hal ini dikarenakan jika ada pelatihan yang membutuhkan waktu yang lama, maka akan terjadi kekosongan di kantor tersebut, terutama bidang pencegahan dan kesiapsiagaan”. (Wawancara Pada 6 November 2017 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan banyak sekali kegiatan pelatihan-pelatihan terkait penanggulangan bencana, yang sangat berguna untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Adapun hambatan yang terjadi jika ada pelatihan, dikarenakan keterbatasan personil BPBD Kabupaten Malang, khususnya di Bidang Pencegahan dan kesiap-siagaan yang berupa terjadinya kekosongan posisi apabila ada personil yang dikirim untuk pelatihan dalam jangka waktu yang cukup lama. Berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kabupaten Malang Tahun 2015, jumlah anggaran dana pembangunan kapasitas sumber daya aparatur berjumlah Rp. 50.000.000,00. Selain itu, ada pula daftar nama personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang yang telah mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas BPBD Kabupaten Malang yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3. Daftar Nama Peserta Diklat BPBD Kabupaten Malang Tahun 2015

NO	NAMA	JABA TAN	JENIS PELATIHAN
1	SUHARTA NTO	STAF	1. LATIHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS TEKNIS TINGKAT SEKSI SRC PB WILAYAH TIMUR 2. LATIHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS TEKNIS TINGKAT BIDANG SRC PB WILAYAH TIMUR 3. LATIHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS TEKNIS TINGKAT GABUNGAN SRC PB WILAYAH TIMUR 4. PELATIHAN DASAR SELAM DAN PERAHU KARET OLEH PMI KABUPATEN MALANG 5. PELATIHAN ADMINISTRATOR WEBSITE 6. PELATIHAN RENCANA KONTIJENSI BENCANA (RENKON) & STANDAR MINIMUM KEMANUSIAAN UNTUK PENGUNGI (SPHERE) 7. PELATIHAN BAGI PENYULUH MITIGASI BENCANA GERAKAN TANAH DI JAWA TIMUR
2	DIXIE AGITAS SUHUD ADI	STAF	1. LATIHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS TEKNIS TINGKAT SEKSI SRC PB WILAYAH TIMUR 2. LATIHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS TEKNIS TINGKAT BIDANG SRC PB WILAYAH TIMUR

	WIEDAGD O		<p>3. LATIHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS TEKNIS TINGKAT GABUNGAN SRC PB WILAYAH TIMUR</p> <p>4. PELATIHAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA (PRB) PARTICIPATORY DISASTER RISK ASSESSMENT (PDRA)</p> <p>5. PELATIHAN RENCANA KONTIJENSI BENCANA (RENKON) & STANDAR MINIMUM KEMANUSIAAN UNTUK PENGUNGI (SPHERE)</p> <p>6. PELATIHAN BAGI PENYULUH MITIGASI BENCANA GERAKAN TANAH DI JAWA TIMUR</p>
3	INDRA ERMAWAN	STAF	<p>1. PELATIHAN DESAIN PERENCANAAN DAN MONERI BAGI BPBD DI DELAPAN KABUPATEN DI JAWA TIMUR</p> <p>2. DIKLAT MITIGASI BENCANA GUNUNG API DI JAWA TIMUR</p> <p>3. PELATIHAN BAGI PENYULUH MITIGASI BENCANA GERAKAN TANAH DI JAWA TIMUR</p> <p>4. DIKLAT AIFDR PENGKAJIAN RISIKO BENCANA</p> <p>5. PELATIHAN OSM, GI, INASAFE</p> <p>6. GELAR RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA</p>
4	AGUNG CANDRA	STAF	<p>1. PELATIHAN BAGI PENYULUH MITIGASI BENCANA GERAKAN TANAH DI JAWA TIMUR</p>

	FIRMANSY AH		
5	YOHAN WICAKSO NO	STAF	<ol style="list-style-type: none"> 1. PELATIHAN PERENCANAAN EVAKUASI 2. PELATIHAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA (PRB) PARTICIPATORY DISASTER RISK ASSESSMENT (PDRA) 3. PELATIHAN RENCANA KONTIJENSI BENCANA (RENKON) & STANDAR MINIMUM KEMANUSIAAN UNTUK PENGUNGI (SPHERE) 4. PELATIHAN DAN PENDIDIKAN TINGKAT PERTAMA (DIKLATAMA III) DKC PB – LPBINU 5. DIKLAT MITIGASI BENCANA GUNUNG BERAPI DI JAWA TIMUR 6. PELATIHAN BAGI PENYULUH MITIGASI BENCANA GERAKAN TANAH DI JAWA TIMUR
6	RIZKY DWI PRASTYA WAN	STAF	<ol style="list-style-type: none"> 1. KOMPETENSI TEKNIS PROSEDUR OPERASIONAL RADIO KOMUNIKASI BAGI TENAGA OPERATOR RAIO KOMUNIKASI 2. BIMTEK PENATAAN ADMINISTRASI SURAT DINAS BAGI PENGELOLA ADMINISTRASI SURAT DINAS DI LINGKUNGAN PEMKAB MALANG

			<p>3. PELATIHAN RENCANA KONTIJENSI BENCANA (RENKON) & STANDAR MINIMUM KEMANUSIAAN UNTUK PENGUNGI (SPHERE)</p> <p>4. PELATIHAN BAGI PENYULUH MITIGASI BENCANA GERAKAN TANAH DI JAWA TIMUR</p> <p>5. LATIHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS TEKNIS TINGKAT GABUNGAN SRC PB WILAYAH TIMUR</p>
7	SAIFUL ANTONI	STAF	1. PELATIHAN BAGI PENYULUH MITIGASI BENCANA GERAKAN TANAH DI JAWA TIMUR
8	OLDI ADITYA SANTOSO	STAF	1. PELATIHAN BAGI PENYULUH MITIGASI BENCANA GERAKAN TANAH DI JAWA TIMUR
9	SARIANTO	STAF	<p>1. LATIHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS TEKNIS TINGKAT SEKSI SRC PB WILAYAH TIMUR</p> <p>2. LATIHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS TEKNIS TINGKAT GABUNGAN SRC PB WILAYAH TIMUR</p> <p>3. PELATIHAN SELTER OLEH BNPB</p> <p>4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN WATER RESCUE</p> <p>5. PELATIHAN DASAR SELAM DAN PERAHU KARET OLEH PMI KABUPATEN MALANG</p>

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang

2) Upaya Sosialisasi Kegiatan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Penanggulangan bencana berbasis masyarakat memiliki tujuan agar masyarakat mengetahui semua langkah-langkah penanggulangan bencana sehingga dapat mengurangi ancaman, mengurangi dampak, menyiapkan diri secara tepat bila terjadi sebuah ancaman, menyelamatkan diri, memulihkan diri, dan memperbaiki kerusakan yang terjadi agar menjadi masyarakat yang aman, mandiri dan berdaya tahan terhadap bencana.

Upaya sosialisasi kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat bisa berupa mengajak masyarakat untuk membuat peta jalur evakuasi, sosialisasi, simulasi, dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan untuk mewujudkan masyarakat tangguh bencana. Upaya sosialisasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas sudah sangat rutin dilaksanakan, berbagai macam kegiatan berupa sosialisasi dan berbagai pelatihan tentang pengurangan resiko bencana. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Aprilijanto selaku Kasi Kesiapsiagaan, bentuk sosialisasi kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas adalah sebagai berikut :

“Masyarakat diberikan pemahaman tentang bencana, dan diberikan pemahaman terkait potensi bencana di daerah sekitarnya. Masyarakat diikutsertakan untuk memetakan pembuatan jalur evakuasi. Masyarakat diberikan pelatihan dan simulasinya. Masyarakat merupakan tim penanggulangan bencana, untuk membuat peta evakuasi dan peta kebencanaan masyarakat diikutsertakan dikarenakan masyarakat yang mengerti akan kearifan lokal yang ada di Desa Ngadas tersebut, dan BPBD Kabupaten Malang memiliki peran untuk membimbing masyarakat”.

Salah satu cara untuk menjadikan masyarakat tangguh bencana diawali dengan adanya partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat tangguh bencana, dikarenakan masyarakat merupakan aktor sekaligus korban jika ada bencana terjadi. Berbagai macam bentuk sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Malang merupakan bentuk upaya kepedulian pemerintah Kabupaten Malang dalam membangun masyarakat tangguh bencana.

Selain sosialisasi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Malang, kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat kerap dilaksanakan baik dari pihak Desa Ngadas maupun komunitas peduli bencana. Adapun beberapa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Sugeng selaku perangkat Desa Ngadas menjelaskan bentuk sosialisasi kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak desa yaitu :

“Sosialisasi terkait penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas sudah sangat sering dilakukan, kegiatan sosialisasi tersebut melibatkan ibu PKK, Kader-kader dan masyarakat lainnya. Sosialisasi juga pernah dilaksanakan di sekolah, yang disana kita memberikan pemahaman tentang bencana dan pencegahannya. Bentuk sosialisasi yang sudah dilaksanakan merupakan pembangunan kapasitas masyarakat. Dengan cara menyadarkan masyarakat bahwa Desa Ngadas merupakan daerah yang rawan bencana terutama bencana erupsi Gunung Bromo dan Semeru”. (Wawancara pada tanggal 13 November 2017 di Balai Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang).

Selain pihak desa yang sering melakukan kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat, salah satu komunitas peduli bencana

yaitu Kobar Bromo juga kerap melakukan kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudir Supriadi selaku koordinator komunitas Kobar Bromo, adapun kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dilakukan oleh komunitas peduli bencana Kobar Bromo adalah sebagai berikut:

“Kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat dilaksanakan oleh komunitas Kobar Bromo. Kegiatan sosialisasi berupa penguatan kapasitas masyarakat yang berada di sekitar gunung bromo salah satunya masyarakat di Desa Ngadas agar sadar akan bahaya yang ada di daerah tempat tinggal mereka. Adapun kegiatan tersebut berupa pertolongan pertama pada gawat darurat (PPGD), pelatihan-pelatihan penanggulangan bencana, dan yang terakhir adalah membentuk team siaga desa. (Wawancara berama Bapak Sudir Supriadi selaku koordinator komunitas Kobar Bromo pada tanggal 13 November 2017 di Balai Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

Kesadaran masyarakat Desa Ngadas akan adanya potensi bencana alam di sekitarnya patut untuk diapresiasi. Wujud dari masyarakat tangguh bencana adalah masyarakat yang sadar akan adanya potensi ancaman bencana di lingkungan sekitarnya. Berbagai sosialisasi kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dilaksanakan baik oleh BPBD Kabupaten Malang, pihak Desa Ngadas dan Komunitas Kobar Bromo merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah dan masyarakat bahwa bencana yang terjadi merupakan urusan bersama, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat.

3) Upaya Pelembagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Salah satu kunci keberhasilan penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah proses pelebagaan. Penguatan kelembagaan baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga usaha merupakan kunci keberhasilan dari upaya pengurangan resiko bencana. Proses pelebagaan tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya sehingga dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Kelebagaan dinilai dari tersedianya pengaturan kelembagaan seperti memiliki struktur organisasi, peran, tugas yang jelas serta mampu menjalin jaringan dengan semua kalangan, baik pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat.

Pelebagaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat ditujukan untuk menegakkan eksistensi penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Hal ini dikarenakan penanggulangan bencana berbasis masyarakat harus berjalan secara berdampingan antara pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha. Diperlukan peraturan yang jelas untuk setiap aktor yang terlibat pada kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa pihak yang mendukung kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas yaitu Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengelolaan air. Selain itu, ada juga dari pihak komunitas peduli bencana.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yohan selaku staff bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menjelaskan tentang upaya pelebagaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas, yaitu :

“Upaya pelebagaan di Desa Ngadas melibatkan banyak lembaga, baik dalam negeri, maupun luar negeri. Dikarenakan melibatkan banyak pihak yang terlibat didalamnya, maka diperlukan peraturan untuk mengatur seluruh lembaga yang berpartisipasi. Pada dasarnya proses kelembagaan merupakan penguatan hubungan baik antar pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat. Upaya pelebagaan diharapkan dapat membantu kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas. Berbagai macam kegiatan dalam rangka penguatan kelembagaan di Desa Ngadas salah satunya adalah membuat rencana kontijensi banjir lahar hujan bersama *United Nations Development programme* (UNDP)”. (Wawancara Pada 6 November 2017 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Selanjutnya, Bapak Joni selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan memberikan keterangan terkait upaya pelebagaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas, yaitu :

“Salah satu program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang adalah membuat desa tangguh bencana, khususnya di daerah-daerah yang memiliki kerawanan bencana, dikarenakan Desa Ngadas adalah desa yang memiliki kerawanan bencana, maka dibentuklah desa tangguh bencana di sana. Di desa tersebut, BPBD Kabupaten Malang membentuk team siaga desa yang dibuat berdasarkan kultur masyarakat dan kultur desa tersebut, serta keinginan masyarakat. Team siaga desa tersebut pada saat dibentuk pertama kali berjumlah 20 personil dan sewaktu-waktu dapat bertambah jumlahnya tergantung kondisi yang dibutuhkan, team siaga desa ini masih dibawah kendali Kepala Desa selaku pemberi komando penanggulangan bencana di tingkat desa. Peran team siaga desa adalah melaksanakan kegiatan mitigasi struktural dan non struktural di desa tersebut, jadi upaya pelebagaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah dengan dibentuknya team siaga desa”. (Wawancara pada tanggal 6 November 2017 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas banyak melibatkan aktor dari lembaga-lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan pelebagaan tersebut harus ada peraturan yang mengatur di dalamnya. Proses pelebagaan merupakan proses penguatan hubungan antara pemerintah, lembaga

usaha, dan masyarakat yang diharapkan dapat membantu kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas, dan salah satu kegiatan bersama *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk membuat rencana kontijensi kebencanaan di Desa Ngadas.

Selanjutnya, upaya pelembagaan penanggulangan bencana di Desa Ngadas adalah adanya pembentukan sebuah tim siaga desa yang anggotanya berasal dari masyarakat itu sendiri. Adapun kegiatan dari tim siaga desa tersebut adalah berupa mitigasi struktural, dan mitigasi non struktural. Team siaga desa tersebut masih dibawa pengendalian Kepala Desa. Pada awalnya, jumlah personil team siaga desa sebanyak dua puluh orang personil, akan tetapi jumlah personil tersebut dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan.

4) Pelibatan Aktor dalam Kegiatan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Pada proses kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, diperlukan untuk menjalin sebuah kemitraan didalamnya, kemitraan tersebut dapat dilaksanakan baik oleh pihak pemerintah maupun dengan lembaga usaha. Proses kemitraan tersebut, merupakan alat penunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Malang. Di tingkat pemerintahan proses kemitraan dilaksanakan pada suatu forum yaitu forum pengurangan resiko bencana (PRB), yang ditujukan untuk meningkatkan sinergitas dan mempercepat kemajuan

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Malang. Forum pengurangan resiko bencana ini diharapkan mampu mempercepat proses birokrasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pemerintah.

Selain itu, forum PRB juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap proses penyusunan dan proses evaluasi kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Malang. Hal lain yang diperlukan pemerintah Kabupaten Malang adalah melakukan penguatan kemitraan antara pemerintah dan lembaga usaha dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana. Dengan adanya dukungan dan partisipasi dari lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, diharapkan adanya kontrak kerjasama antara pemerintah Kabupaten Malang dan lembaga usaha dalam upaya pengurangan resiko bencana dan kontrak kerjasama yang mendukung persediaan kebutuhan-kebutuhan penanganan darurat an pemulihan bencana.

Dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Malang, banyak aktor-aktor yang terlihat di dalamnya, di tingkat pemerintah daerah segala bentuk kegiatan panggulan bencana menjadi tanggung jawab dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain BPBD juga ada dinas-dinas yang terkait yang turut membantu kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan kapasitas dari dinas tersebut, yaitu :

Tabel 4. Daftar Nama Instansi dan Peran pada Kegiatan Penanggulangan Bencana

No	Instansi	Peranan
1	Badan Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang	Mengoordinir, melaksanakan sekaligus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Malang. Selain itu juga melakukan pengawasan dan pengendalian serta penataan hukum lingkungan dalam pencegahan bencana terkait konservasi alam dan lingkungan hidup.
2	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang	Merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik (pangan, sandang, dan kebutuhan lainnya) untuk korban bencana.
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang	Merencanakan pencegahan, penyuluhan kesiap-siagaan, pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan termasuk obat-obatan, logistik kesehatan dan tenaga medis/paramedis.
4	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malang	Merencanakan, mengendalikan dan menyiapkan lokasi dan jalur evakuasi,

		kebutuhan pemulihan sarana/prasarana publik dan pengadaan fasilitas darurat.
5	Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang	Merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi, komunikasi dan informasi.
6	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Malang	Merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-sarana pendidikan.
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang	Mendukung perencanaan, pengawasan dan evaluasi program-program pembangunan yang peka resiko bencana bersama dengan dinas-dinas terkait.
8	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Malang	Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi khususnya kebakaran hutan dan lahan serta bencana kekeringan atau bencana lain yang terkait dengan pertanian.
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, Pertambangan dan Energi Kabupaten Malang	Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi khususnya di bidang geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi. Selain itu menyelenggarakan program-program kegiatan

		ekonomi di daerah-daerah pasca bencana untuk mempercepat pemulihan.
10	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang	Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana dan abrasi pantai.
11	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Malang	Merencanakan dan mengendalikan penyediaan bahan pangan dan gizi kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
12	Badan Keluarga Berencana, Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Merencanakan, mendukung, dan mengendalikan kegiatan pemberayaan masyarakat di daerah rawan bencana serta mengidentifikasi kebutuhan dan melindungi kelompok rentan.
13	Rumah Sakit Umum Kanjuruhan Kabupaten Malang dan Rumah Sakit Umum Lawang Kabupaten Malang	Berperan membantu pelayanan kesiapsiagaan, mitigasi dan memberikan pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan.

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Malang

Selain itu, ada juga instansi lain yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Malang, yaitu :

1. Palang Merah Indonesia (PMI)
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
3. Taruna Swadaya Masyarakat (TAGANA)
4. Pramuka
5. Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI)
6. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)
7. Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta.

Pada Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa prinsip dalam pelaksanaan penanggulangan bencana adalah terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh. Berdasarkan dengan prinsip tersebut maka setiap tindakan penanggulangan bencana perlu melibatkan berbagai macam *stakeholder*, hal ini ditujukan untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang terlibat dan memetakan tugas-tugas yang sesuai dengan kapasitas para *stakeholder*. Sehingga kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat dapat berlangsung secara terkoordinir.

Kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat banyak sekali melibatkan berbagai pihak didalamnya, berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yohan selaku staff bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang menjelaskan siapa saja aktor yang terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, yaitu :

“Aktor yang terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah seluruh dinas yang terkait dengan penanggulangan

bencana, yaitu Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya, Dinas Sosial, perwakilan dari *search and Rescue* (SAR), Palang Merah Indonesia (PMI), Dinas Pengairan, Pemerintah Daerah dan pihak dari Kecamatan Poncokusumo. Aktor yang terlibat dari lembaga usaha senior yaitu Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta. Selain itu beberapa organisasi internasional seperti *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *Food Agriculture Organization* (FAO), lembaga-lembaga tersebut bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang” (Wawancara pada tanggal 6 November 2017 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Dapat disimpulkan dari wawancara di atas bahwa kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat banyak melibatkan aktor di dalamnya, dengan adanya aktor-aktor tersebut dapat dikatakan bahwa penanggulangan bencana berbasis masyarakat bukan hanya tugas dari pemerintah saja, melainkan tugas dari seluruh pemangku kepentingan yang ada. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat tersebut turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengurangan resiko bencana yang telah diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun lembaga usaha.

Seiring berjalannya waktu, aktor yang terlibat pada pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas semakin bertambah. Hal ini dikarenakan para aktor tersebut mempunyai kewajiban untuk membantu sesuai dengan kapasitas yang dimiliki para aktor tersebut. Berikut adalah data identifikasi pemangku kepentingan dan perannya dalam Rencana Penanggulangan Bencana Desa (RPB) di Desa Ngadas yaitu :

Tabel 5. Identifikasi Pemangku Kepentingan dan Perannya dalam Pembuatan Rencana Penanggulangan bencana (RPB) di Desa Ngadas

No	Aktor	Keterangan	Peran Aktor
----	-------	------------	-------------

1	Pemerintah	Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Puskesmas, Pemerintah Kabupaten beserta SKPD terkait pemerintah Provinsi beserta SKPD terkait, dan Pemerintah Pusat	1. Memiliki regulasi dan kebijakan sekaligus skema pendanaan dalam anggaran pendapatan belanjanya 2. Memiliki program, SDM, dan dana untuk penanggulangan bencana
2	Tokoh Masyarakat	Tokoh Politik Tokoh Pemberdayaan Tokoh Pendidikan Tokoh Penggerak Perempuan	Memiliki kedudukan dan pengaruh di masyarakat sehingga mendapatkan peranan
3	Tokoh Agama	Para pemuka agama dari semua agama yang dianut oleh masyarakat Desa Ngadas	Memberikan motivasi spiritual kepada masyarakat untuk penanggulangan bencana
4	FPRB Desa	Forum Pengurangan Reiko Bencana Desa yang diinisiasi melalui program	Menjadi aktor utama dalam penanggulangan bencana desa

		Desa Tangguh Bencana 2015	
5	Perguruan Tinggi	Mengadakan program KKN, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat	Memiliki sumber daya pengetahuan yang bermanfaat untuk penanggulangan bencana
6	Pihak swasta	Para pelaku usaha di desa dan atau luar desa yang berkontribusi seperti PT Jasa Tirta, PJB	Memiliki sumber daya untuk memberikan dan sponsorship untuk kegiatan kebencanaan di Desa Ngadas
7	LSM/ Donatur/Program Donor	Program Desa Tangguh 2015, Program Krespo UNDP-BPBD Kabupaten Malang	Memiliki sumber daya (pengetahuan, SDM, dan dana) untuk penanggulangan bencana
8	Lain-lain	Mengakomodir potensi dari pihak-pihak seperti : Palang Merah Indonesia (PMI), dan masyarakat umum	Memiliki sumber daya berdasarkan program dan anggaran yang dimiliki untuk penanggulangan bencana

*Sumber : Laporan Hasil Akhir Fasilitasi Ketangguhan Masyarakat Tangguh
Bencana Desa Ngadas tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa penanggulangan bencana berbasis masyarakat banyak sekali aktor yang terlibat didalamnya. Peran aktor tersebut dapat menjadi kunci keberhasilan penanggulangan bencana berbasis masyarakat dikarenakan seluruh elemen masyarakat secara langsung dilibatkan, baik dalam forum pengurangan resiko bencana (PRB) maupun bentuk kegiatan penanggulangan bencana lainnya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

a. Faktor Pendukung

Dalam membangun masyarakat tangguh bencana, tentu akan ada berbagai macam faktor pendukung agar proses membangun masyarakat tangguh bencana tersebut dapat berlangsung dengan baik, adapun faktor pendukung dalam membangun masyarakat tangguh bencana di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yaitu :

1) Sumber Pendanaan yang Memadai

Salah satu faktor pendukung kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat yaitu sumber pendanaan. Pendanaan penanggulangan bencana di tingkat daerah didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Bhkti selaku staff darurat Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menjelaskan sebagai berikut

:

“Salah satu faktor pendukung dari kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah sumber pendanaan. Pendanaan penanggulangan bencana di tingkat daerah didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Malang. Dana tersebut dialokasikan untuk membuat desa tangguh bencana (DESTANA). Selain itu, dana tersebut juga dialokasikan untuk kegiatan pembangunan kapasitas, dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana”. (Wawancara pada tanggal 6 November 2017 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pendanaan merupakan salah satu faktor pendukung kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Hal ini dikarenakan kegiatan penanggulangan bencana sangat membutuhkan dana dengan jumlah yang besar, terutama pada kegiatan pra bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi.

2) Adanya Dukungan dari Lembaga Internasional

Adanya dukungan dari lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman, dan risiko bencana. Dalam rangka membangun masyarakat tangguh bencana di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, ada beberapa lembaga internasional yang mendukung kegiatan tersebut, yaitu *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *Food and Agriculture Organizations* (FAO). Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Bhekti selaku staff darurat Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Malang menjelaskan peran lembaga internasional tersebut di Desa Ngadas sebagai berikut :

“Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang sedang bekerjasama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) terkait pembuatan aplikasi Sistem Informasi Desa yang didalamnya memuat data-data kependudukan Desa Ngadas. Selain itu, BPBD Kabupaten Malang bekerjasama dengan *Food and Agriculture Organizations* (FAO) terkait dengan tempat pengungsian hewan ternak dan pakan hewan ternak ketika terjadi bencana” (Wawancara pada tanggal 6 November 2017 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Selanjutnya, pendapat Bapak Bhukti ditegaskan kembali oleh Bapak Yohan selaku staff bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, yaitu :

“Ada dukungan dari *Food and Agriculture Organizations* (FAO), melakukan peningkatan pangan pada saat kegiatan penanggulangan bencana, lalu *United Nations Development Programme* (UNDP) lebih membantu pada kegiatan sistem informasi penanggulangan bencana, seperti seperti pembuatan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID)”. (Wawancara pada tanggal 6 November 2017 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya kerjasama dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dengan lembaga-lembaga Internasional terkait membangun masyarakat tangguh bencana di Desa Ngadas. Adapun bentuk dukungan dari lembaga internasional tersebut adalah dari lembaga *United Nations Development Programme* (UNDP) membantu dengan pembuatan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID). Selanjutnya dari lembaga *Food and Agriculture Organizations* (FAO) membantu terkait dengan tempat pengungsian hewan ternak dan pakan hewan ternak ketika terjadi bencana. Selanjutnya, seluruh lembaga internasional tersebut membantu sesuai dengan kapasitas dari lembaga-lembaga terkait.

3) Peran Aktif Sektor Swasta

Sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang lembaga usaha diberikan kesempatan dalam kegiatan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain. Salah satu faktor pendukung untuk membangun masyarakat tangguh bencana di Desa Ngadas adalah adanya bantuan berupa dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak selaku Yohan staff Kesiapsiagaan menjelaskan peran lembaga usaha untuk kegiatan penanggulangan bencana di Desa Ngadas sebagai berikut :

“Kalo dari pihak lembaga usaha belum ada, akan tetapi dulu PT. Sampoerna pernah memberikan bantuan untuk program pembangunan kapasitas masyarakat Desa Ngadas berupa dana dan *Handy Talky* di setiap lokasi serta mendapat dukungan besar dari PT. Sampoerna” (Wawancara pada tanggal 13 November 2017 di Balai Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, masih belum adanya lembaga swasta yang masuk untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana, akan tetapi PT. Sampoerna pernah memberikan bantuan untuk program pembangunan kapasitas masyarakat Desa Ngadas berupa dana dan *Handy Talky* di setiap lokasi serta mendapat dukungan besar dari PT. Sampoerna.

Selanjutnya, Bapak Joni selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang memberikan keterangan terkait peran aktif sektor swasta dalam upaya membangun masyarakat

tangguh bencana di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, yaitu :

“Banyak sekali bantuan-bantuan dari pihak swasta dalam rangka membangun masyarakat tangguh bencana di Desa Ngadas. Pihak swasta yang terlibat selain PT. Sampoerna, adalah PT. Semen Gresik yang pernah membantu kegiatan mitigasi di Desa Ngadas. Jenis bantuan memang bukan uang tunai, akan tetapi dalam bentuk konkret, seperti semen sebagai bahan baku untuk rehabilitasi jalan dan pemukiman yang rawan roboh. (Wawancara pada tanggal 6 November 2017 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya belum ada bantuan dari lembaga usaha, akan tetapi PT. Sampoerna pernah memberikan bantuan untuk program pembangunan kapasitas masyarakat Desa Ngadas berupa dana dan *Handy Talky* di setiap lokasi serta mendapat dukungan besar dari PT. Sampoerna. Selain itu, adapun bantuan dari lembaga usaha PT. Semen Gresik pernah memberikan bantuan dalam bentuk konkret, seperti semen sebagai bahan baku untuk rehabilitasi jalan dan pemukiman yang rawan roboh.

4) Peran Aktif Masyarakat

Pada proses membangun masyarakat tangguh bencana, masyarakat merupakan aktor utama dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan tersebut masyarakat diberikan pendidikan, pelatihan dan simulasi jika terjadi sebuah bencana. Selain itu, masyarakat diberikan kesempatan untuk membuat peta jalur evakuasi jika terjadi sebuah bencana, serta masyarakat diikutsertakan dalam pembuatan rencana penanggulangan bencana (PRB) di daerahnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Sugeng selaku Perangkat Desa Ngadas, menjelaskan tentang peran masyarakat dalam rangka membangun masyarakat tangguh bencana, yaitu :

“Peran masyarakat diperlukan dalam kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, terutama saat membuat peta rawan bencana, membuat rencana penanggulangan bencana, penentuan jalur evakuasi dikarenakan masyarakat merupakan korban terdampak langsung dari sebuah bencana, maka dari itu masyarakat dijadikan aktor utama dalam kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, lalu masyarakat lebih mengerti akan karakteristik wilayah tempat mereka tinggal”. (Wawancara pada tanggal 13 November 2017 di Balai Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang).

Selain itu, Bapak Jatmiko selaku warga Dusun Ngadas memberikan keterangan tentang peran aktif masyarakat pada kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, yaitu :

“Peran aktif masyarakat adalah turut serta berpartisipasi pada kegiatan penanggulangan bencana dan manfaat dari kegiatan tersebut adalah membuat masyarakat lebih waspada jika suatu waktu terjadi bencana dan mengetahui apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan warga Desa Ngadas apabila bencana terjadi”. (Wawancara pada tanggal 13 November 2017 di Dusun Ngadas Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan bencana berbasis masyarakat merupakan kebutuhan masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana. Peran masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana berupa membantu membuat peta rawan bencana, membuat rencana penanggulangan dan menentukan jalur evakuasi yang sesuai dengan kearifan lokal tempat tinggal mereka. Selain itu, peran aktif masyarakat diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat pada kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, seperti pada forum pengurangan resiko bencana.

b. Faktor Penghambat

Dalam membangun masyarakat tangguh bencana, tentu ada berbagai faktor penghambat seiring dengan berjalannya proses membangun masyarakat tangguh bencana, adapun faktor penghambat dalam membangun masyarakat tangguh bencana di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yaitu :

1) Masih Rendahnya Tingkat Kedisiplinan Masyarakat

Masyarakat merupakan aktor utama dalam upaya menjadikan masyarakat tangguh bencana. Salah satu faktor penghambat dalam membangun masyarakat tangguh bencana adalah masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, hal ini dikarenakan masih rendahnya cara pandang masyarakat terhadap jenjang pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Aprilijanto selaku Kasi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yaitu :

“Masyarakat merupakan relawan, jadi untuk masalah penerapan kedisiplinan tidak bisa dipaksakan, seperti untuk meminta data terkait kebencanaan sekarang, baru dikirim minggu depan. Selain itu ketika akan ada pelatihan, harusnya berjumlah 20 peserta, akan tetapi yang datang hanya 15 orang, hal ini dapat dimungkinkan karna tingkat pendidikan masyarakat masih rendah. Meskipun seperti itu, kami dari pihak BPBD Kabupaten Malang selaku penanggung jawab penyelenggaraan bencana tetap melaksanakan kegiatan tersebut, meskipun jumlah peserta tidak sesuai dengan yang diharapkan”. (Wawancara pada tanggal 6 November 2017 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat masih kurang, hal ini merupakan salah satu penghambat dalam mewujudkan masyarakat tangguh bencana. Meskipun masih ada kendala dalam

kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, BPBD Kabupaten Malang tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2) Jaringan Komunikasi yang Sulit

Kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat diperlukan koordinasi yang baik dan menyeluruh. Koordinasi yang baik didukung oleh komunikasi yang baik. Akan tetapi jaringan komunikasi di Desa Ngadas masih sangat sulit untuk dijangkau. Hal ini dapat mengganggu kegiatan penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Bhekti selaku staff darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang menjelaskan sebagai berikut :

“Di Desa Ngadas sangat susah sekali jaringan komunikasi, padahal untuk kegiatan penanggulangan bencana diperlukan komunikasi yang intens agar jika suatu waktu terjadi bencana, dapat menjalankan komunikasi dengan baik, maka dari itu untuk menjalin komunikasi setiap dusun di Desa Ngadas dibekali oleh *handy talky* untuk menjalin komunikasi”. (Wawancara pada tanggal 6 November 2017 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masih sulitnya jaringan komunikasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa Ngadas. Meskipun masih terkendala sulitnya jaringan komunikasi, hal ini masih dapat diantisipasi dengan cara membekali *handy talky* di setiap dusun agar komunikasi dapat berjalan dengan baik.

Hasil dari penyelenggaraan manajemen bencana ini memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat Desa Ngadas. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Joni selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan menjelaskan manfaat dari penyelenggaraan manajemen bencana bagi masyarakat Desa Ngadas adalah :

“Yang pertama Masyarakat Desa Ngadas memiliki kemampuan untuk mengantisipasi setiap ancaman atau bahaya yang akan terjadi. Hal ini dapat dilihat dari kejadian bencana pada akhir tahun 2015 tepatnya bulan desember, Desa Ngadas terdampak geyser abu vulkanik yang disemburkan gunung bromo, akan tetapi masyarakat Desa Ngadas mampu memprediksi dan mengantisipasinya. Kemampuan ini memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik pengetahuan yang modern hingga kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat. Kedua, Masyarakat Desa Ngadas memiliki kemampuan untuk menghindari ancaman bencana. Kemampuan ini didukung dengan pembuatan peta rawan bencana dan penentuan jalur evakuasi agar memudahkan masyarakat Desa Ngadas menyelamatkan diri apabila bencana sewaktu-waktu terjadi. Ketiga, Masyarakat Desa Ngadas memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan bencana dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kejadian bencana longsor yang melanda Desa Ngadas sehingga mengakibatkan sebagian dusun di desa tersebut menjadi terisolir akibat putusnya jalan penghubung antar dusun, akan tetapi masyarakat Desa Ngadas mampu beradaptasi dan bertahan dengan membuat jalur darurat. Upaya masyarakat Desa Ngadas untuk memperkecil dampak yang ditimbulkan atau mitigasi bencana, seperti tidak membangun tempat tinggal di lereng-lereng yang berpotensi rawan terjadinya longsor, membuat jalur-jalur darurat menuju pengungsian, dan membangun pondasi beton pada lereng yang terkena dampak longsor. Pengalihan resiko atau *risk transfer*, seperti asuransi bencana mulai dibudayakan. Pada dasarnya mengadaptasi bencana ini bertujuan agar kesadaran masyarakat Desa Ngadas untuk menerima resiko bencana semakin tinggi. Dan yang terakhir adalah Masyarakat Desa Ngadas memiliki kemampuan untuk pulih kembali secara cepat setelah terjadi bencana. Ketangguhan suatu masyarakat dalam menanggulangi bencana dapat dilihat dari kemampuan masyarakat tersebut untuk pulih kembali setelah ditimpa bencana. Masyarakat di Kabupaten Malang khususnya masyarakat Desa Ngadas telah membuktikan ketangguhan terhadap bencana. menurut data kejadian bencana yang dihimpun oleh BPBD Kabupaten Malang sejak manajemen bencana berbasis masyarakat mulai diterapkan di Desa Ngadas menunjukan penurunan jumlah korban jiwa

setiap tahunnya”. (Wawancara pada tanggal 20 Desember 2017 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan manajemen bencana memberikan empat dampak positif bagi masyarakat Desa Ngadas yaitu Masyarakat Desa Ngadas memiliki kemampuan untuk mengantisipasi setiap ancaman atau bahaya yang akan terjadi. Hal ini dapat dilihat dari kejadian bencana pada desember tahun 2015, dimana Desa Ngadas terdampak geyuran abu vulkanik yang disebarkan gunung bromo, akan tetapi masyarakat Desa Ngadas mampu memprediksi dan mengantisipasi bencana tersebut.

Kemudian yang kedua, Masyarakat Desa Ngadas memiliki kemampuan untuk menghindari ancaman bencana. Kemampuan ini didukung dengan pembuatan peta rawan bencana dan penentuan jalur evakuasi agar memudahkan masyarakat Desa Ngadas menyelamatkan diri apabila bencana sewaktu-waktu terjadi

Ketiga, Masyarakat Desa Ngadas memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan bencana dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kejadian bencana longsor yang melanda Desa Ngadas sehingga mengakibatkan sebagian dusun di desa tersebut menjadi terisolir akibat putusnya jalan penghubung antar dusun, akan tetapi masyarakat Desa Ngadas mampu beradaptasi dan bertahan dengan membuat jalur darurat. Upaya masyarakat Desa Ngadas untuk memperkecil dampak yang ditimbulkan atau mitigasi bencana, seperti tidak membangun tempat tinggal di lereng-lereng yang berpotensi rawan terjadinya longsor, membuat jalur-jalur darurat menuju pengungsian, dan membangun pondasi beton pada lereng yang

terkena dampak longsor. Pengalihan resiko atau *risk transfer*, seperti asuransi bencana mulai dibudayakan. Pada dasarnya mengadaptasi bencana ini bertujuan agar kesadaran masyarakat Desa Ngadas untuk menerima resiko bencana semakin tinggi.

Dan yang terakhir, adalah Masyarakat Desa Ngadas memiliki kemampuan untuk pulih kembali secara cepat setelah terjadi bencana. Ketangguhan suatu masyarakat dalam menanggulangi bencana dapat dilihat dari kemampuan masyarakat tersebut untuk pulih kembali setelah ditimpa bencana. Masyarakat di Kabupaten Malang khususnya masyarakat Desa Ngadas telah membuktikan ketangguhan terhadap bencana. menurut data kejadian bencana yang dihimpun oleh BPBD Kabupaten Malang sejak manajemen bencana berbasis masyarakat mulai diterapkan di Desa Ngadas menunjukan penurunan jumlah korban jiwa setiap tahunnya.

E. Analisis Data Fokus Penelitian

1. Penyelenggaraan Manajemen Bencana dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana

a. Regulasi tentang Manajemen Bencana dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana

Sesuai dengan Visi BNPB yaitu “Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana”, penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat di Indonesia yang dikelola oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam manajemen bencana atau dalam undang-undang tersebut disebut pengelolaan bencana. Pengelolaan bencana merupakan urusan untuk pemerintah daerah yang mengacu pada peraturan pemerintah pusat sehingga terjadi sinergitas dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana.

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, dalam menghadapi potensi bencana yang cukup tinggi di Kabupaten Malang, maka BPBD Kabupaten Malang selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu membuat rencana-rencana penanggulangan bencana secara sistematis dan terukur dalam upaya penanggulangan bencana. Dalam rangka mewujudkan visi dari BPBD Kabupaten Malang yaitu “Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Malang dalam Menghadapi Bencana”, maka dari itu BPBD Kabupaten Malang memiliki peran sebagai perencana dalam membangun masyarakat tangguh bencana.

Mengingat berbagai macam ancaman bencana alam tersebut, BPBD Kabupaten Malang memiliki tugas sebagai regulator atau pembuat kebijakan terkait penanggulangan bencana. Kebijakan penanggulangan bencana merupakan kebijakan yang memuat program-program pra-bencana, saat tanggap bencana, maupun pasca bencana. Proses perumusan kebijakan penanggulangan bencana tersebut dirumuskan dalam sebuah forum yang melibatkan seluruh *stakeholder* di dalamnya.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Yohan selaku staff Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang bahwa BPBD Kabupaten Malang memiliki tugas sebagai pembuat kebijakan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, kebijakan tersebut berupa kebijakan terkait desa tangguh bencana, mengajukan program kegiatan desa tangguh bencana, selanjutnya setiap aktor yang terlibat akan diberikan Surat Keputusan (SK) baik SK Kepala Pelaksana, maupun SK Bupati.

Dalam upaya proses pembuatan kebijakan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Kepala (PERKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang selanjutnya BPBD Kabupaten Malang mengadopsi peraturan tersebut, lalu merumuskan kebijakan penanggulangan bencana bersama dinas teknis terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Malang. Dan proses terakhir dari pembuatan kebijakan tersebut diajukan kepada badan hukum.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Joni selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang terkait peran BPBD Kabupaten Malang bahwa BPBD Kabupaten Malang, bisa berperan sebagai pembentuk, pembina, pengendali, dan juga pengarah agar kegiatan desa tangguh bencana tersebut dapat berjalan lancar. Sebagai pembuatan kebijakan, BPBD Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Daerah tentang penanggulangan bencana, dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kebijakan penanggulangan bencana meliputi kebijakan administratif dan kebijakan teknis.

Berdasarkan draft Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang dalam perumusan kebijakan penanggulangan bencana dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. Kebijakan administratif
2. Kebijakan teknis

Kebijakan administratif adalah suatu kebijakan pendukung pada kebijakan teknis yang akan diterapkan untuk mengurangi potensi jumlah masyarakat terpapar dan mengurangi potensi aset yang mungkin hilang akibat kejadian bencana pada suatu kawasan. Kebijakan administratif lebih mengacu pada pembangunan kapasitas daerah secara umum dan terfokus kepada pembangunan perangkat daerah untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah tersebut.

Penentuan tingkat ketahan daerah dilaksanakan berdasarkan indikator kerangka Aksi Hyogo atau *Hyogo Frameworks for Actions* (HFA). Pada prosesnya, penentuan tingkat ketahanan daerah ini juga menghasilkan tindakan prioritas yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada lingkup kawasan kajian. Adapun tindakan-tindakan prioritas yang teridentifikasi menjadi dasar penyusunan kebijakan yang bersifat administratif adalah :

1. Perkuatan regulasi dan kelembagaan;
2. Perencanaan penanggulangan bencana terpadu;
3. Penelitian, pendidikan dan pelatihan;
4. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat.

Selain kebijakan administratif, perumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan bencana adalah kebijakan yang bersifat teknis. Kebijakan yang bersifat teknis diperoleh berdasarkan kajian dan peta resiko bencana. Komponen kebijakan yang bersifat teknis dan harus dipertimbangkan untuk setiap bencana pada level terendah pemerintah dalam lingkup kajiannya. Penyusunan kebijakan teknis harus memperhatikan peta resiko bencana yang telah disusun. Peta resiko bencana mampu memperlihatkan tingkat resiko di setiap daerah pemerintahan terendah yang dikaji. Sama halnya dengan penyusunan kebijakan yang bersifat administratif, kebijakan teknis disusun dengan berdiskusi dan berkonsultasi dengan para pemangku kebijakan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adapun komponen-komponen kebijakan yang bersifat administratif adalah :

1. Perlindungan masyarakat dari bencana
2. Penanganan bencana

Dalam upaya membangun masyarakat tangguh bencana, diperlukan sebuah kebijakan untuk mengatur terkait masyarakat tangguh bencana. Dikarenakan kebijakan tersebut nantinya berguna untuk melindungi masyarakat dari bahaya ancaman bencana jika suatu waktu terjadi.

Bila hasil penelitian terkait kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam membangun masyarakat tangguh bencana dikaitkan dengan konsep lembaga dan kebijakan manajemen bencana di Indonesia menurut (Kusumasari, 2014:76) menjelaskan bahwa kebijakan penanggulangan bencana dibuat untuk melindungi masyarakat dari bencana merupakan tugas dan tanggung jawab dari

pemerintah. Kebijakan-kebijakan terkait bencana bertujuan untuk mengurangi faktor resiko bencana. Selanjutnya menurut Solway dalam Kusumasari (2014:61) menjelaskan bahwa terdapat tujuh peran pemerintah daerah dalam pengelolaan bencana, salah satunya adalah melaksanakan program pendidikan dan penyadaran masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bekerjasama dengan sekolah-sekolah setempat.

b. Tahapan Manajemen Bencana dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana

1) Membangun Kapasitas dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Aparatur BPBD Kabupaten Malang

Pembangunan kapasitas merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah organisasi. Bentuk pembangunan kapasitas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi yaitu dengan cara melaksanakan berbagai pelatihan-pelatihan dan pengembangan guna meningkatkan kemampuan sumber daya yang ada. Berbagai macam bentuk pembangunan kapasitas dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh instansi swasta yang berguna untuk meningkatkan kinerja para pegawainya, serta pembangunan kapasitas berguna untuk meningkatkan keahlian para pegawainya.

Pada proses penanggulangan bencana kemampuan sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan dari proses penanggulangan bencana, maka dari itu diperlukan berbagai macam pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada. Menurut Grindle dalam santoso dkk (2012:39) menjelaskan bahwa pembangunan kapasitas dijelaskan sebagai *“Capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance”*, pembangunan kapasitas merupakan upaya yang dimaksud untuk mengembangkan berbagai macam strategi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responsivitas dari kinerja pemerintah.

Untuk mewujudkan pembangunan kapasitas dari kinerja pemerintah, diperlukan pula peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dari pemerintah tersebut. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah ditujukan untuk memberikan keterampilan yang lebih dan lebih mengutamakan praktik daripada teori. Kompetensi sumber daya aparatur dalam organisasi sektor publik mempunyai kedudukan atau fungsi yang sangat penting, sebab seiring dengan perjalanan waktu, semakin banyak kebutuhan-kebutuhan dan tantangan baru yang berkembang dengan pesat, sehingga membutuhkan penanganan serius dan maksimal (Saleh, et.al 2003:21).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Sadono selaku Kasi Pencegahan BPBD Kabupaten Malang, berbagai bentuk pelatihan kebencanaan merupakan upaya dari BPBD Kabupaten Malang dalam rangka membangun kapasitas personil BPBD Kabupaten Malang dalam bidang manajemen bencana.

Meskipun dalam kegiatan tersebut terkadang terdapat kendala pendanaan, tetapi para personil BPBD Kabupaten Malang yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan, tetap mengikuti pelatihan yang akan diselenggarakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua personil yaitu Bapak Bhekti selaku staff Darurat dan Bapak Yohan selaku staff Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang yang memberikan keterangan terkait apa saja pelatihan yang telah didapat, manfaat yang didapat dari pelatihan, serta hambatan apa saja yang datang pada saat pelatihan. Berbagai pelatihan yang sudah didapat baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah seperti pelatihan Satuan Reaksi Cepat (SRC) yang diselenggarakan oleh pusat, lalu pelatihan bersama Palang Merah Indonesia (PMI) dan untuk tingkat daerah latihan gabungan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu. Hambatan yang sering melanda adalah kegiatan teknis, berupa faktor cuaca yang kurang mendukung berjalannya kegiatan pelatihan, hambatan lainnya berupa kendala transportasi jika ada pelatihan ke luar kota. Pelatihan-pelatihan yang sudah didapat memberikan banyak sekali manfaat, berupa ilmu yang baru dan teknik penanggulangan bencana yang baru.

Kegiatan pelatihan selanjutnya yang pernah dilaksanakan adalah pelatihan pemetaan erupsi Gunung Sinabung, lalu pelatihan fasilitator Desa Tangguh Bencana di Karo Sumatera Utara bersama *United Nations Development Programme* (UNDP). Hambatan yang terjadi adalah berupa keterbatasan personil, seperti di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, hal ini jika ada personil yang dikirim untuk pelatihan keluar kota, maka akan terjadi kekosongan posisi di kantor.

Bentuk pelatihan-pelatihan merupakan wujud dari pembangunan kapasitas sumber daya BPBD Kabupaten Malang. Menurut Grindle dalam santoso dkk (2012:39) menjelaskan bahwa pembangunan kapasitas dijelaskan sebagai *“Capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance”*, pembangunan kapasitas merupakan upaya yang dimaksud untuk mengembangkan berbagai macam strategi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responsivitas dari kinerja pemerintah.

Selain itu menurut (Nurjanah dkk, 2013:97) peningkatan kapasitas berkaitan dengan program atau kegiatan untuk meningkatkan pembangunan kapasitas bangsa atau masyarakat yang dicirikan oleh kapasitas untuk tangguh menghadapi bencana. Kegiatan-kegiatan dalam rangka membangun kapasitas adalah melalui pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu kebencanaan, penerapan teknologi penanggulangan bencana melalui penataan ruang.

Dari hasil wawancara bersama Kasi Pencegahan BPBD Kabupaten Malang, peneliti menemukan bahwa pentingnya pembangunan kapasitas dalam rangka peningkatan sumber daya BPBD Kabupaten Malang sudah dilakukan dengan baik oleh pihak BPBD Kabupaten Malang, meskipun terdapat kendala pendanaan didalamnya, para personil BPBD Kabupaten Malang tetap melaksanakan pelatihan-pelatihan tersebut, yang dimana pelatihan tersebut sangatlah berguna dan menjadi bekal untuk BPBD Kabupaten Malang dalam penanggulangan bencana.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama kedua personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, peneliti menemukan bahwa dengan adanya kegiatan pelatihan yang sering dilakukan, dapat mempermudah pekerjaan di bidang penanggulangan bencana, meskipun ada kendala teknis yang terkadang menjadi penghambat, dan kendala berupa minimnya personil BPBD Kabupaten Malang.

2) Upaya Sosialisasi Kegiatan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Penanggulangan bencana berbasis masyarakat merupakan upaya yang dilakukan masyarakat secara terorganisir baik pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dengan sumber daya yang mereka miliki semaksimal mungkin untuk menghindari, mengurangi dan memulihkan diri dari dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berbasis masyarakat dilaksanakan karena masyarakat adalah pihak pertama yang langsung berhadapan dengan ancaman bencana, maka dari itu kesiapan masyarakat menentukan besar kecilnya dampak bencana di masyarakat.

Sosialisasi kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat merupakan bentuk upaya pemberdayaan masyarakat di bidang penanggulangan bencana. Menurut (Soetomo, 2011:88) pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, politik, sosial, dan

budaya, agar masyarakat menjadi mandiri dan dapat mengatur masa depannya sendiri. Unsur pertama dari pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat.

Pada proses pemberdayaan masyarakat di bidang manajemen bencana, menurut (Kusumasari, 2014:91) manajemen bencana berbasis masyarakat, lebih memfokuskan masyarakat sebagai aktor utama yang mengembangkan dan menerapkan kebijakan penting yang paling sesuai bagi mereka dalam hal penanggulangan bencana. Selain itu, pemberian pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana merupakan kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab penting terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan berdasarkan Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana, serta mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana.

Bentuk sosialisasi kegiatan penanggulangan bencana sering dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun komunitas peduli bencana. Salah satu desa di Kabupaten Malang yang kerap menerima sosialisasi kegiatan penanggulangan bencana adalah Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Dari hasil wawancara bersama Bapak Aprilijanto selaku Kasi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Malang, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Ngadas adalah dengan cara memberikan pemahaman tentang bencana kepada

masyarakat, masyarakat diikutsertakan untuk membuat peta jalur evakuasi dan masyarakat diberikan pelatihan-pelatihan dan simulasinya.

Bila hasil penelitian terkait upaya sosialisasi kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang telah dikemukakan oleh (Soetomo, 2011:88) bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan agar masyarakat mampu mengatur hidupnya sendiri dan mengatur masa depannya sendiri dengan cara pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas. Selanjutnya menurut (Kusumasari, 2014:91) manajemen bencana berbasis masyarakat, lebih memfokuskan masyarakat sebagai aktor utama yang mengembangkan dan menerapkan kebijakan penting yang paling sesuai bagi mereka dalam hal penanggulangan bencana.

Dapat disimpulkan, bahwa upaya kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, merupakan wujud dari pemberdayaan masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan penting yang paling sesuai bagi masyarakat dalam hal penanggulangan bencana. Selanjutnya masyarakat diberikan kesempatan mengembangkan kapasitas lewat sosialisasi, pendidikan tentang penanggulangan bencana.

Selain kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang sering dilaksanakan oleh pemerintah Desa Ngadas, kegiatan sosialisasi penanggulangan

bencana berbasis masyarakat kerap dilakukan oleh komunitas peduli bencana yaitu komunitas Kobar Bromo dari hasil wawancara bersama koordinator Kobar Bromo yaitu Bapak Suir Supriadi, Berbagai jenis pelatihan yang diberikan kepada masyarakat Desa Ngadas yaitu berupa penguatan kapasitas dari masyarakat itu sendiri. Setelah penguatan kapasitas tersebut, pelatihan dimulai dengan lokal latih, lalu pemberian pelatihan tentang pertolongan gawat darurat (PPGD), dan terakhir membuat team siaga desa.

Selain kegiatan sosialisasi yang kerap dilakukan oleh komunitas Kobar Bromo, pihak Desa Ngadas juga kerap melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana bersama para masyarakat desanya. Dari hasil wawancara bersama salah satu perangkat desa yaitu Bapak Sugeng bahwa kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait penanggulangan bencana bersama warga kerap dilaksanakan, sosialisasi bersama ibu anggota PKK, kader-kader, simulasi di sekolah, dan menggambar potensi ancaman bencana di Desa Ngadas dan mempelajari penanggulangannya sedini mungkin.

Jika hasil penelitian tentang upaya kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas, dikaitkan dengan konsep manajemen bencana berbasis komunitas yang telah dikemukakan oleh (Ulum, 2014:39) bahwa suatu komunitas dalam konteks manajemen bencana dapat diartikan sebagai sebuah kelompok masyarakat yang dapat mempunyai satu atau dua kesamaan, seperti tinggal di lingkungan yang sama, terpapar resiko bahaya yang serupa, atau sama-sama terkena dampak suatu bencana. Tujuan utama dalam manajemen bencana

berbasis komunitas ini adalah untuk memberdayakan masyarakat (lokal) dengan mendukung mereka untuk semakin mandiri (Ulum, 2014:42)

Dari hasil upaya kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas, peneliti menemukan bahwa masyarakat Desa Ngadas memiliki budaya sadar bencana yang sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari tingkat kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah Desa Ngadas, dan komunitas peduli bencana. Bentuk sosialisasi kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas, dimulai dengan membangun kapasitas masyarakat dan memberikan penyadaran secara langsung kepada masyarakat, bahwa di sekeliling tempat tinggal mereka terdapat berbagai ancaman bencana yang dapat merugikan harta benda dan keberlangsungan hidup masyarakat Desa Ngadas.

3) Upaya Pelembagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Dalam kaitannya dengan peristiwa bencana yang terjadi di suatu daerah, ada kebutuhan yang perlu dikembangkan dengan kemampuan dalam pengelolaan bencana berdasarkan karakteristik lingkungan dan potensi resiko bencana. Salah satu yang dibutuhkan adalah eksistensi dan kemampuan lembaga dalam mengelola bencana. Sesuai dengan Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki

tanggung jawab dalam mengelola suatu bencana melalui lembaga yang bernama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tingkat nasional, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk tingkat daerah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Yohan selaku staff Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang terkait upaya pelebagaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, pelebagaan penanggulangan bencana di Desa Ngadas dilaksanakan bersama masyarakat, dimana peran masyarakat desa dari mulai perencanaan dan penyusunan program masyarakat diikutsertakan, sedangkan BPBD Kabupaten Malang bertugas melakukan pendamping pelebagaan dan monitoring serta evaluasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Joni selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang menjelaskan, bahwa salah satu program BPBD Kabupaten Malang adalah membentuk desa tangguh bencana, khususnya di daerah-daerah yang memiliki kerawanan bencana. Dikarenakan Desa Ngadas merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, maka dibentuklah desa tangguh di desa tersebut.

Bentuk upaya pelebagaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas adalah dengan dibuatnya team siaga desa, yang dibentuk berdasarkan kultur desa tersebut, dan team siaga desa dibentuk berdasarkan kultur masyarakat. Team siaga desa memiliki peran sebagai pelaksana kegiatan

mitigasi struktural maupun non struktural, dan team siaga desa tersebut masih dibawah kendali Kepala Desa.

Menurut (Nurjanah dkk, 2013:96) bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki unsur sebagai *Steering Commite* (SC) sebagai unsur pengarah dan (*Excuting Body*) sebagai unsur pelaksana. Unsur pengarah tersebut terdiri dari wakil instansi pemerintah dan dari masyarakat profesional. Sedangkan unsur pelaksana terdiri dari tenaga personil yang memiliki keahlian, kemampuan, dan kompetensi di bidang penanggulangan bencana. Diluar kelembagaan pemerintah tersebut, dapat dibentuk kelembagaan non pemerintah (termasuk pembentukan forum-forum) untuk disinergikan dengan kapasitas pemerintah.

4) Pelibatan Aktor dalam Kegiatan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Untuk mewujudkan kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna diperlukan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, baik antara pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat diperlukan menjalin kemitraan yang baik antar *stakeholder*. Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas banyak sekali aktor yang terlibat, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yohan selaku staff Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat untuk tingkat

instansi pemerintah Kabupaten Malang adalah dinas teknis yang berhubungan dengan kegiatan penanggulangan bencana. Dinas teknis tersebut bekerja sesuai dengan tupoksi yang sudah ada.

Selain instansi pemerintah, ada juga lembaga internasional seperti *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *Food Agriculture Organization* (FAO) yang bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang dan masyarakat Desa Ngadas terkait penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Pelibatan aktor dalam kegiatan penanggulangan bencana sangat erat kaitannya dengan proses kemitraan pada penanggulangan bencana, bahwa kerjasama antar pemangku kepentingan dalam kegiatan penanggulangan bencana merupakan kunci keberhasilan dalam kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Menurut (Sulstyani, 2004: 129) kemitraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang baik.

Tujuan dari kemitraan itu sendiri adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Kemitraan dapat dilakukan oleh seluruh pihak, baik perseorangan maupun badan hukum, atau kelompok. Dalam penanggulangan bencana, kerjasama antar aktor dalam rangka kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat sangatlah dibutuhkan,

dikarenakan kegiatan penanggulangan bencana memerlukan pelibatan aktor di dalamnya.

2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Dalam rangka membangun masyarakat tangguh bencana di kecamatan Poncokusumo tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat dalam membangun masyarakat tangguh bencana di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Dari hasil penelitian terkait dengan faktor pendukung dan penghambat dalam membangun masyarakat tangguh bencana diantaranya :

a. Faktor Pendukung

1) Sumber Pendanaan yang Memadai

Meskipun ada beberapa anggapan bahwa penanggulangan bencana memiliki anggaran dana yang sangat sedikit di setiap tahunnya, akan tetapi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap bisa melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas Kabupaten Malang. Dari hasil wawancara bersama Bapak Bhekti selaku staff Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang memberikan keterangan bahwa sumber dana penanggulangan bencana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan dana yang bisa digunakan untuk

kegiatan membangun desa tangguh bencana, pembuatan rencana kontijensi, dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Dapat disimpulkan bahwa anggaran dana pada kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat sangatlah diperlukan, meskipun beberapa pihak beranggapan tentang dana penanggulangan bencana yang sangat minim, tetapi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang dapat mengelola anggaran yang telah disediakan sebaik mungkin.

2) Adanya Dukungan dari Lembaga Internasional

Dukungan internasional dalam rangka membangun masyarakat tangguh bencana di Desa Ngadas datang dari *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *Food and Agriculture Organization* (FAO). Dari hasil wawancara bersama Bapak Bhukti selaku staff Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, peran masing-masing dari lembaga internasional sangat memberikan kontribusi baik terhadap kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, seperti UNDP bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Malang terkait pembuatan aplikasi Sistem Aplikasi Desa (SID), yang didalamnya memuat data kependudukan Desa Ngadas, selain itu FAO saat ini bekerjasama dengan pihak BPBD Kabupaten Malang terkait tempat pengungsian hewan ternak dan pakan hewan ternak ketika terjadi bencana.

Selanjutnya, dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yohan selaku staff Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang menjelaskan bahwa, dukungan dari FAO melalui peningkatan

pangan pada saat kegiatan penanggulangan bencana, lalu *United Nations Development Programme* (UNDP) lebih membantu pada kegiatan sistem informasi penanggulangan bencana, seperti pembuatan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID)

Jika hasil tersebut dikaitkan dengan peran lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah menurut (Kusumasari, 2013:103) memiliki tujuan mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana. Dapat disimpulkan bahwa peran lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang baik bagi penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Selanjutnya, menurut (Nurjanah dkk, 2013:103) menjelaskan bahwa lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau organisasi internasional lainnya. Dalam rangka kegiatan penanggulangan bencana, lembaga internasional memiliki tujuan untuk mendukung upaya penguatan penanggulangan bencana, pengurangan ancaman, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

3) Peran Aktif Sektor Swasta

Dalam upaya membangun masyarakat tangguh bencana, Desa Ngadas mendapat dukungan dari salah satu lembaga usaha yang berada di wilayah Desa Ngadas, berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak selaku Yohan staff Kesiapsiagaan menjelaskan peran lembaga usaha untuk kegiatan penanggulangan

bencana di Desa Ngadas yaitu masih belum adanya lembaga swasta yang masuk untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana, akan tetapi PT. Sampoerna pernah memberikan bantuan untuk program pembangunan kapasitas masyarakat Desa Ngadas berupa dana dan *Handy Talky* di setiap lokasi serta mendapat dukungan besar dari PT. Sampoerna.

Selanjutnya, Bapak Joni selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang memberikan keterangan terkait peran aktif sektor swasta dalam upaya membangun masyarakat tangguh bencana di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, bahwa sebenarnya belum ada bantuan dari lembaga usaha, akan tetapi PT. Sampoerna pernah memberikan bantuan untuk program pembangunan kapasitas masyarakat Desa Ngadas berupa dana dan *Handy Talky* di setiap lokasi serta mendapat dukungan besar dari PT. Sampoerna. Selain itu, adapun bantuan dari lembaga usaha PT. Semen Gresik pernah memberikan bantuan dalam bentuk konkret, seperti semen sebagai bahan baku untuk rehabilitasi jalan dan pemukiman yang rawan roboh.

Peran aktif lembaga usaha menurut (Nurjanah dkk, 2013:115) dijelaskan bahwa dunia usaha memiliki tanggung jawab sosial yang dilaksanakan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Melalui CSR ini dipahami bahwa keberhasilan sebuah perusahaan secara berkelanjutan tidak lepas dari dukungan masyarakat. Profit tidak hanya diukur dari aspek finansial semata, akan tetapi juga diukur dari aspek lingkungan dan sosial (*triple bottom line*).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 4 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 22, dijelaskan bahwa lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama pihak lain. Selanjutnya pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4) Peran Aktif Masyarakat

Kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat sejauh ini mendapatkan banyak sekali dukungan-dukungan dari masyarakat setempat. Berdasarkan dari hasil wawancara bersama Bapak Yohan selaku staff Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang dalam membangun masyarakat tangguh bencana, adanya dukungan dari masyarakat membuat pihak BPBD Kabupaten Malang tidak mengalami kesulitan jika akan mengadakan sosialisasi penanggulangan bencana di Desa Ngadas.

Selanjutnya, Bapak Jatmiko selaku warga Dusun Ngadas Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, memberikan penjelasan bahwa peran aktif masyarakat adalah turut berpartisipasi pada kegiatan penanggulangan bencana, dan manfaat dari kegiatan tersebut adalah membuat masyarakat lebih mewaspadaai jika suatu waktu terjadi bencana. Masyarakat kerap diikutsertakan pada forum pengurangan resiko bencana (PRB).

Peran aktif masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana pada saat ini menurut (Nurjanah dkk, 2013:114) dikembangkan melalui model desa tangguh, desa siaga atau istilah lainnya sebagai pengelolaan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat atau komunitas. Berdasarkan dokumen *United Nations Office for Disaster Risk Reduction* (UN-ISDR) dalam Nurjanah dkk (2013:114) dijelaskan bahwa “kapasitas sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang berpotensi terpapar bahaya, untuk menyesuaikan diri terhadap ancaman, memiliki mekanisme bertahan dan mampu memulihkan diri terhadap dampak bencana. Kapasitas tersebut ditentukan oleh sejauh mana sistem sosial yang ada mampu mendorong masyarakat untuk mengorganisir diri sendiri dalam meningkatkan kapasitas belajarnya dari bencana yang lalu demi perlindungan yang lebih baik di masa depan serta mampu meningkatkan tindakan-tindakan resiko”.

b. Faktor Penghambat

1) Masih Rendahnya Tingkat Kedisiplinan Masyarakat

Meskipun dalam rangka membangun masyarakat tangguh bencana di Desa Ngadas mendapatkan dukungan dari masyarakat, akan tetapi ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam rangka membangun masyarakat tangguh bencana. Faktor tersebut adalah masih rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat di Desa Ngadas.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Aprilijanto selaku Kasi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

Malang bahwa masih minimnya tingkat kedisiplinan masyarakat, seperti ketika meminta data terkait kebencanaan, selalu ada keterlambatan untuk pengiriman data tersebut, selain itu ketika akan melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi, yang seharusnya peserta dengan jumlah 20 orang, akan tetapi yang datang hanya 15 orang.

2) Jaringan Komunikasi yang Sulit

Tidak dapat dipungkiri, bahwa komunikasi merupakan salah satu kebutuhan paling penting bagi manusia, dengan adanya komunikasi manusia dapat berhubungan langsung meskipun salah satunya berda di tempat yang jauh. Dalam upaya membangun masyarakat tangguh bencana di Desa Ngadas terdapat hambatan berupa jaringan komunikasi yang sulit. Hal ini dapat mengganggu kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Bhekti selaku staff Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, bahwa jaringan komunikasi di Desa Ngadas sangat sulit, padahal dalam kegiatan penanggulangan bencana membutuhkan komunikasi yang *intens* agar jika suatu waktu terjadi bencana, dapat menjalankan komunikasi dengan baik. Kesulitan jaringan komunikasi tersebut diatasi dengan setiap dusun diberikan *Handy Talky* untuk menjalin komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Joni selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan manajemen bencana dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat Desa Ngadas. Adapun

manfaat dari penyelenggaraan manajemen bencana bagi masyarakat Desa Ngadas adalah :

1. Masyarakat Desa Ngadas memiliki kemampuan untuk mengantisipasi setiap ancaman atau bahaya yang akan terjadi. Hal ini dapat dilihat dari kejadian bencana pada akhir tahun 2015 tepatnya bulan desember, Desa Ngadas terdampak geyuran abu vulkanik yang disemburkan gunung bromo, akan tetapi masyarakat Desa Ngadas mampu memprediksi dan mengantisipasinya. Kemampuan ini memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik pengetahuan yang modern hingga kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat.
2. Masyarakat Desa Ngadas memiliki kemampuan untuk menghindari ancaman bencana. Kemampuan ini didukung dengan pembuatan peta rawan bencana dan penentuan jalur evakuasi agar memudahkan masyarakat Desa Ngadas menyelamatkan diri apabila bencana sewaktu-waktu terjadi.
3. Masyarakat Desa Ngadas memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan bencana dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kejadian bencana longsor yang melanda Desa Ngadas sehingga mengakibatkan sebagian dusun di desa tersebut menjadi terisolir akibat putusnya jalan penghubung antar dusun, akan tetapi masyarakat Desa Ngadas mampu beradaptasi dan bertahan dengan membuat jalur darurat. Upaya masyarakat Desa Ngadas untuk memperkecil dampak yang ditimbulkan atau mitigasi bencana, seperti tidak membangun tempat tinggal di lereng-lereng yang berpotensi rawan terjadinya longsor, membuat jalur-

jalur darurat menuju pengungsian, dan membangun pondasi beton pada lereng yang terkena dampak longsor. Pengalihan resiko atau risk transfer, seperti asuransi bencana mulai dibudayakan. Pada dasarnya mengadaptasi bencana ini bertujuan agar kesadaran masyarakat Desa Ngadas untuk menerima resiko bencana semakin tinggi.

4. Masyarakat Desa Ngadas memiliki kemampuan untuk pulih kembali secara cepat setelah terjadi bencana. Ketangguhan suatu masyarakat dalam menanggulangi bencana dapat dilihat dari kemampuan masyarakat tersebut untuk pulih kembali setelah ditimpa bencana. Masyarakat di Kabupaten Malang khususnya masyarakat Desa Ngadas telah membuktikan ketangguhan terhadap bencana. menurut data kejadian bencana yang dihimpun oleh BPBD Kabupaten Malang sejak manajemen bencana berbasis masyarakat mulai diterapkan di Desa Ngadas menunjukan penurunan jumlah korban jiwa setiap tahunnya.

Peran aktif masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana pada saat ini menurut (Nurjanah dkk, 2013:114) dikembangkan melalui model desa tangguh, desa siaga atau istilah lainnya sebagai pengelolaan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat atau komunitas. Berdasarkan dokumen *United Nations Office for Disaster Risk Reduction* (UN-ISDR) dalam Nurjanah dkk (2013:114) dijelaskan bahwa “kapasitas sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang berpotensi terpapar bahaya, untuk menyesuaikan diri terhadap ancaman, memiliki mekanisme bertahan dan mampu memulihkan diri terhadap dampak bencana. Kapasitas tersebut ditentukan oleh sejauh mana sistem sosial yang ada mampu mendorong

masyarakat untuk mengorganisir diri sendiri dalam meningkatkan kapasitas belajarnya dari bencana yang lalu demi perlindungan yang lebih baik di masa depan serta mampu meningkatkan tindakan-tindakan resiko”.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian Penyelenggaraan Manajemen Bencana dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyelenggaraan Manajemen Bencana dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana, yaitu BPBD Kabupaten Malang Sebagai Regulator Manajemen Bencana dalam membangun masyarakat tangguh bencana, yaitu membuat kebijakan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Terdapat tiga tahap dalam membuat kebijakan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, pada tahap pertama adalah membuat peraturan terkait desa tangguh, pada tahap kedua BPBD Kabupaten Malang mengajukan program kegiatan desa tangguh, dan pada tahap ketiga BPBD Kabupaten Malang memberikan Surat Keputusan (SK) baik SK Kepala Pelaksana, maupun SK Bupati kepada setiap aktor yang terlibat pada kegiatan desa tangguh jika cakupannya lebih luas yang memberikan SK tersebut adalah Bupati. Selain membuat kebijakan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, BPBD mempunyai peran sebagai pembuat kebijakan penanggulangan bencana, kebijakan penanggulangan bencana dibuat mengacu pada Peraturan Kepala (PERKA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Kemudian diikuti dengan Tahapan-tahapan Manajemen Bencana dalam Membangun Masyarakat Tangguh Bencana, yang diantaranya yaitu:

a. Pembangunan Kapasitas dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Malang

BPBD Kabupaten Malang dalam membangun masyarakat tangguh bencana harus diimbangi dengan keahlian dan kemampuan yang memadai. Hal ini dikarenakan kegiatan penanggulangan bencana memerlukan teknik-teknik yang harus dikuasai oleh personil BPBD Kabupaten Malang. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia BPBD Kabupaten Malang, BPBD Kabupaten Malang kerap melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan penanggulangan bencana baik di tingkat Daerah, Provinsi, maupun tingkat Nasional. Berbagai pelatihan seperti Satuan Reaksi Cepat (SRC), latihan bersama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan *stakeholder* lainnya.

b. Sosialisasi Kegiatan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Desa Ngadas Kabupaten Malang

Kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat merupakan upaya BPBD Kabupaten Malang untuk membangun masyarakat tangguh bencana. Upaya sosialisasi kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan agar masyarakat mengetahui

semua langkah-langkah penanggulangan bencana sehingga dapat menyiapkan diri apabila terjadi sebuah ancaman, menyelamatkan diri apabila terjadi bencana, dan memulihkan diri dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh suatu bencana. Berbagai upaya sosialisasi kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat dilaksanakan baik dari pihak BPBD, Pemerintah desa dan Komunitas peduli bencana yang ada.

c. Pelembagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Desa Ngadas Kabupaten Malang

Penguatan kelembagaan merupakan kunci keberhasilan dari penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Penguatan kelembagaan baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga usaha. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk menegakkan eksistensi penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Pelembagaan tersebut harus didukung dengan peraturan yang jelas untuk setiap aktor yang terlibat.

d. Pelibatan Aktor dalam Kegiatan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Desa Ngadas Kabupaten Malang

Pada kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas, banyak terlibat aktor didalamnya, baik pemerintah, masyarakat, lembaga usaha dan lembaga internasional.

2. BPBD Kabupaten Malang dalam melaksanakan kegiatan tentu memiliki faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung, yaitu :

a. Sumber Pendanaan yang Memadai

Kegiatan penanggulangan bencana tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak ada sumber pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan penanggulangan bencana tersebut didapatkan dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya sumber pendanaan yang memadai, maka dana tersebut dapat digunakan dalam rangka kegiatan membangun masyarakat tangguh bencana. Dana tersebut dialokasikan untuk desa tangguh bencana, kegiatan pembangunan kapasitas dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

b. Adanya Dukungan dari Lembaga Internasional

Lembaga internasional memiliki tujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman, dan resiko bencana. Di Desa Ngadas sendiri, ada beberapa lembaga internasional yang mendukung kegiatan tersebut, yaitu *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *Food and Agriculture Organizations* (FAO). Lembaga-lembaga tersebut bekerja sesuai dengan kapasitas lembaga masing-masing.

c. Peran Aktif Sektor Swasta

Lembaga usaha diberikan kesempatan dalam kegiatan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain. Salah satu faktor pendukung untuk membangun masyarakat tangguh bencana di Desa Ngadas adalah dengan adanya bantuan dana *Corporate Social Reponibility* (CRS).

d. Peran Aktif Masyarakat

Kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat sejauh ini mendapatkan banyak sekali dukungan-dukungan dari masyarakat setempat. Sehingga BPBD Kabupaten Malang tidak mengalami kesulitan jika akan mengadakan sosialisasi kegiatan penanggulangan bencana di Desa Ngadas.

BPBD Kabupaten Malang dalam membangun masyarakat tangguh bencana di Desa Ngadas juga memiliki faktor penghambat yang diantaranya :

a. Masih Rendahnya Tingkat Kedisiplinan Masyarakat

Salah satu faktor penghambat dalam membangun masyarakat tangguh bencana di Desa Ngadas adalah masih rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat. Hal ini dikarenakan jika ada pelatihan terkait penanggulangan bencana yang melibatkan masyarakat, masih bersifat sukarela.

b. Keterbatasan Kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur Desa Ngadas dalam Menggunakan Teknologi

Pada kegiatan penanggulangan bencana, harus didukung dengan kemampuan menggunakan teknologi yang memadai. Desa Ngadas telah mendapat bantuan dari *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk membuat aplikasi Sistem Informai Desa, yang didalamnya memuat segala data kependudukan Desa Ngadas. Akan tetapi masih ada beberapa aparaturnya yang kurang mampu untuk mengoperasikan aplikasi tersebut.

c. Jaringan Komunikasi yang Sulit

Kegiatan penanggulangan bencana, memerlukan komunikasi yang intens, akan tetapi di Desa Ngadas masih sangat sulit untuk melaksanakan komunikasi dikarenakan jaringan yang sulit. Akan tetapi hal ini dapat diatasi dengan pemberian handy talky di setiap dusun.

B. Saran

1. BPBD Kabupaten Malang hendaknya memberikan pelatihan kepada aparaturnya Desa Ngadas, terkait penggunaan teknologi Sistem Informai Desa. Hal ini dikarenakan, masyarakat tangguh bencana harus didukung dengan kemampuan penggunaan teknologi pada kegiatan penanggulangan bencana.

2. BPBD Kabupaten Malang hendaknya menambah jumlah personil sesuai dengan kebutuhan di setiap bidang kerjanya, hal ini dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia di BPB itu sendiri. Penambahan jumlah personil bisa dengan menggunakan perekrutan pegawai honorer untuk membantu pekerjaan di BPBD.
3. Meskipun tingkat keidiplinan masyarakat di Desa Ngadas masih rendah, akan tetapi BPBD Kabupaten Malang dan pihak Aparatur Desa Ngadas harus tetap melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, seperti sosialisasi dan pelatihan-pelatihan terkait penanggulangan bencana. hal ini dikarenakan Desa Ngadas memiliki potensi bencana yang tinggi, dan perlu dukungan oleh kapasitas masyarakat di desa tersebut untuk dapat menyelamatkan diri jika ada bencana suatu waktu datang.
4. Upaya BPBD Kabupaten Malang untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Ngadas harus lebih memperhatikan aspek kearifan lokal yang ada, hal ini dikarenakan kearifan lokal merupakan kepercayaan masyarakat yang sudah turun temurun yang harus dihargai dan dihormati keberadaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Nasional Penanggulangan bencana 2016 *Pengetahuan Bencana Indonesia/Potensi Ancaman Bencana*, Diakses pada tanggal 12 february 2017 dari <<http://www.bnpb.go.id/pengetahuan-bencana/potensi-ancaman-bencana>>.

Draft Pengurangan Resiko Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.

Draft Rencana Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.

Haryono, Bambang Santoso dkk. 2012 *Capacity Building*, Malang UB Press.

Kelly, C. 1995 A framework for improving operational effectiveness and cost efficiency in emergency planning and response. *Disaster Prevention and Management*, 4(3), pp.25-35.

Kusumasari, Bevaola 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.

Miles, B.M., Huberman, M.A., Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis A Source Book*. Edition 3. United State of America: SAGE Publications.

Moh, Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Meleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nurjanah, dkk. 2011. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 4 tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggualangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.

Peraturan Kepala BNPB No 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa Kelurahan Tangguh Bencana.

Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Presiden No 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Nasional.

Peraturan Presiden No 83 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2015.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang 2015.

Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan

